

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS  
TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH  
TIMUR**



**Disusun Oleh**  
**AUSATH**  
**NIM. 170604125**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2024 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ausath  
NIM : 170604125  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila pada kemudian hari adanya tuntutan dari pihak yang lain atas karya penulisan ini dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bahwa saya melakukan pelanggaran, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan saksi yang lainnya berdasarkan aturan yang telah berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebaik-baiknya.

Banda Aceh, 12 September 2023

Yang Menyatakan,



Ausath

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi  
Dengan Judul:

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana  
Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur**

Disusun Oleh:  
Ausath  
NIM. 170604125

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Ana Fitria, SE., M.Sc, RSA  
NIP. 199009052019032019

Pembimbing II



Yulindawati, SE., MM  
NIP. 197907132014112002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,



Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak, CA  
NIP. 198307092014032002

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur

Ausath  
NIM. 170604125

Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (1) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 September 2023 M  
Syawal 14, 1445

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris II

  
Ana Fitria, SE., M.Sc.RSA  
NIP. 199009052019032019

  
Yulindawati, SE., MM  
NIP. 197907132014112002

Penguji I

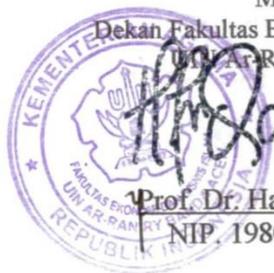
Penguji II

  
Cut Dian Fitri, S.E., M.Si.Ak., CA  
NIP. 198307092014032002

  
Rachmi Meutia, SE., S.Pd.I.  
NIP. 198803192019032013

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec.  
NIP. 19800625009011009



## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ausath  
NIM : 170604125  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
E-mail : ausath01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir     KKU     Skripsi     .....

yang berjudul:

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 12 September 2023

Penulis

Ausath

NIM. 170604125

Pembimbing I

Ana Fitrria, SE., M.Sc, RSA

NIP. 199009052019032019

Pembimbing II

Yulindawati, SE., MM

NIP. 197907132014112002

## KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT, dengan Rahmat dan Hidayah serta Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: ***“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur”***.

Skripsi ini disusun dengan maksud tidak lain hanyalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan dan semangat yang telah diberikan, secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penyusunan Skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi dan Ana Fitria, M.Sc sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiz Maulana, SP., S.Hi., selaku Ketua Laboratorium dan Rachmi Meutia, M.Sc. selaku Asistem Laboratorium Program

Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memudahkan rangkaian proses mulai dari pengajuan judul sampai selesai skripsi ini.

4. Ana Fitria, SE., M.Sc, RSA selaku dosen pembimbing I dan Yulindawati, SE., MM selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya.
6. Terima kasih yang tidak terhingga sebesar-sebesarannya penulis utarakan kepada Ibunda dan Ayahanda dan keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu dan doa serta dukungan moril maupun materil yang tak terhingga kepada penulis.
7. Kepada sahabat-sahabat tercinta dan terkasih penulis sampaikan yang telah memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Serta seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

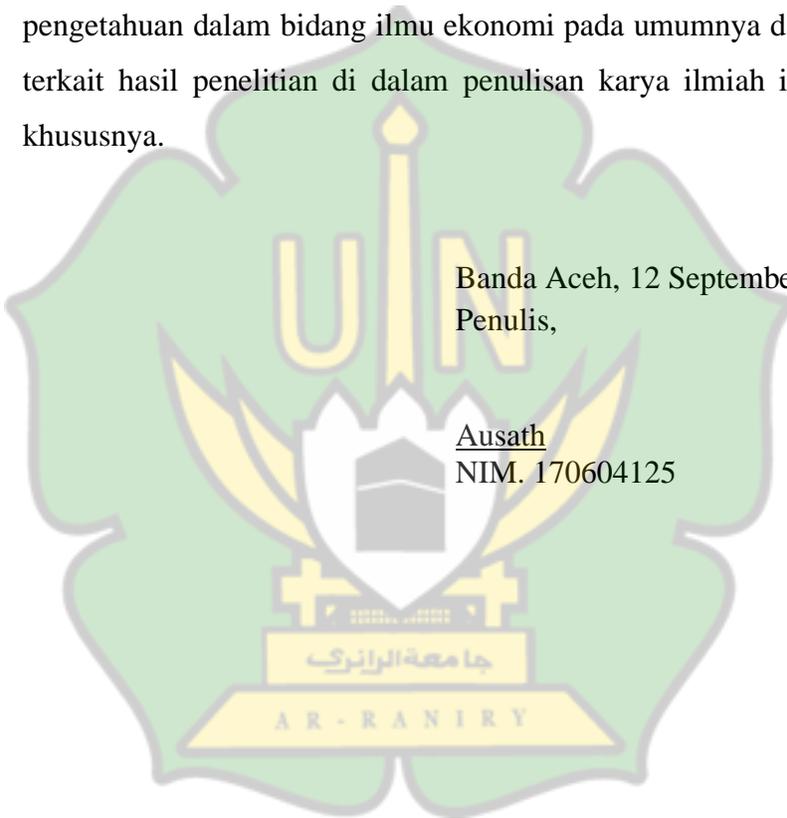
Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi pada umumnya dan yang terkait hasil penelitian di dalam penulisan karya ilmiah ini pada khususnya.

Banda Aceh, 12 September 2023

Penulis,

Ausath

NIM. 170604125



## HALAMAN TRANSLITERASI

**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/  
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Ausath  
NIM : 170604124  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu  
Ekonomi  
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,  
Dana Alokasi Umum dan Dana  
Alokasi Khusus Terhadap  
Kemiskinan di Kabupaten Aceh  
Timur  
Pembimbing I : Ana Fitria, SE., M.Sc, RSA  
Pembimbing II : Yulindawati, SE., MM

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi kemiskinan adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini adalah jenis penelitian korelasional dengan menganalisis hubungan kausalitas antar variabel pengaruh terhadap variabel konsekuen. Sumber data yang digunakan yaitu dokumen Kabupaten Aceh Timur dalam angka dan data kemiskinan yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan ketiga variabel tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  
Dana Alokasi Khusus, Kemiskinan**

## DAFTAR ISI

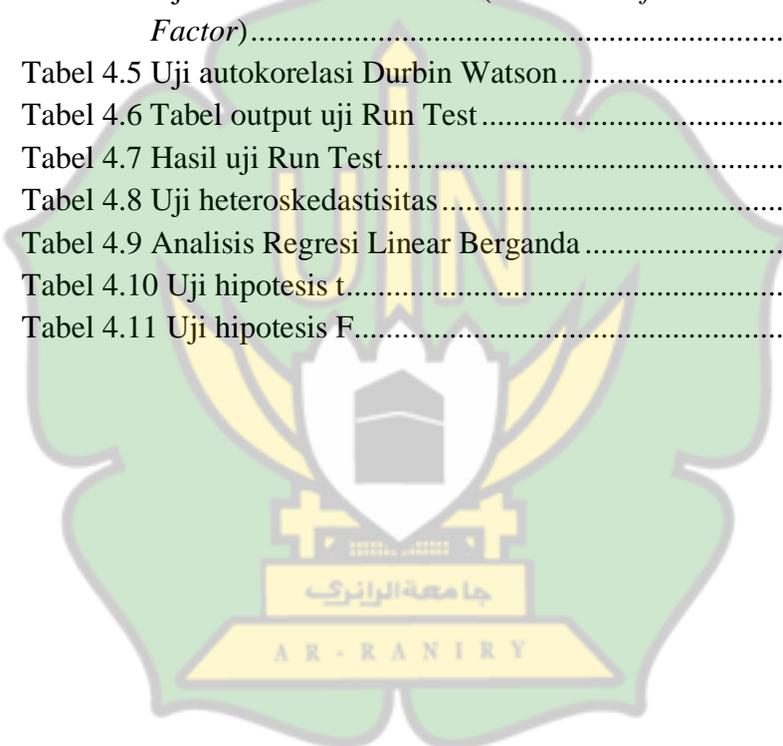
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	
..... Error! Bookmark not defined.	
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	
..... Error! Bookmark not defined.	
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	
..... Error! Bookmark not defined.	
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	
..... Error! Bookmark not defined.	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>sDAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori .....	15
2.1.1 Kemiskinan.....	15
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU).....	35
2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	43

2.2 Penelitian Terkait.....	50
2.3 Kerangka Berpikir .....	55
2.4 Hubungan antar Variabel.....	56
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.....	56
2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.....	58
2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.....	61
2.4.4 Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.....	63
2.5 Hipotesis .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
3.1 Desain penelitian .....	67
3.2 Sumber Data .....	67
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	68
3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel .....	68
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data .....	71
3.5.1 Uji Asumsi Klasik .....	72
3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda .....	74
3.6 Pengujian Hipotesis .....	75
3.6.1 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) .....	75
3.6.2 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F).....	76
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	77
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	79
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	80
4.3.1 Uji Normalitas .....	80
4.3.2 Uji Multikolinearitas .....	81
4.3.3 Uji Autokorelasi .....	83

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas .....	86
4.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	88
4.5 Pengujian Hipotesis .....	90
4.5.1 Hasil Uji t (Parsial) .....	90
4.5.2 Hasil Uji F (Simultan) .....	93
4.6 Pembahasan .....	96
4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur .....	96
4.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur .....	97
4.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur .....	98
4.6.4 Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur .....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
4.1 Kesimpulan .....	102
4.2 Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>

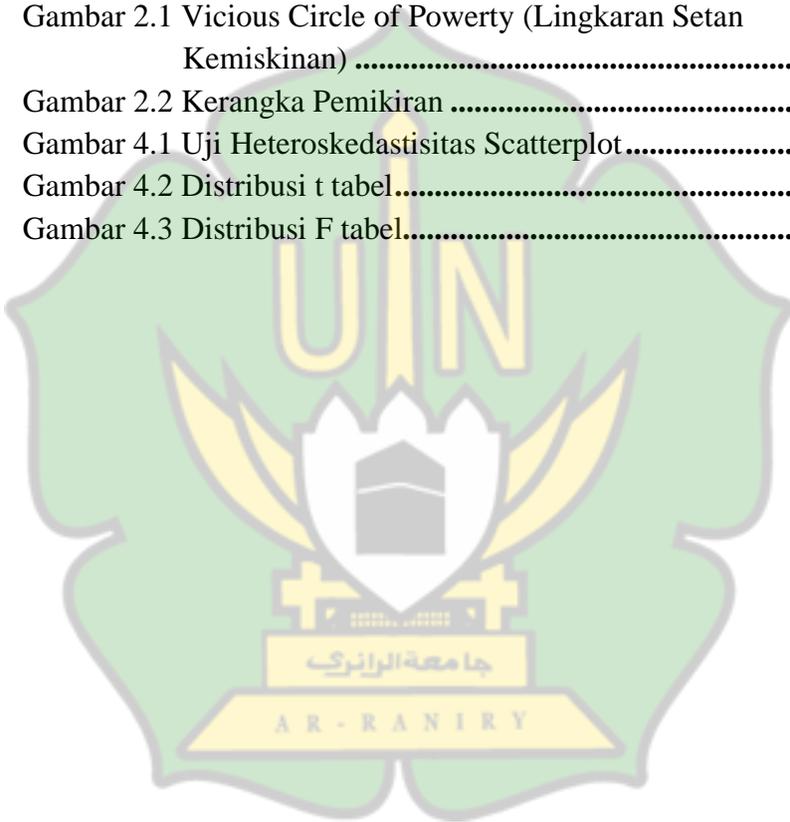
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	50
Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian.....	69
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	77
Tabel 4.2 Uji normalitas kolmogorov-smirnov .....	79
Tabel 4.3 Uji multikolinearitas .....	82
Tabel 4.4 Uji multikolinearitas VIF ( <i>Variance Inflation Factor</i> ).....	83
Tabel 4.5 Uji autokorelasi Durbin Watson.....	84
Tabel 4.6 Tabel output uji Run Test .....	85
Tabel 4.7 Hasil uji Run Test.....	86
Tabel 4.8 Uji heteroskedastisitas .....	87
Tabel 4.9 Analisis Regresi Linear Berganda .....	89
Tabel 4.10 Uji hipotesis t.....	91
Tabel 4.11 Uji hipotesis F.....	94



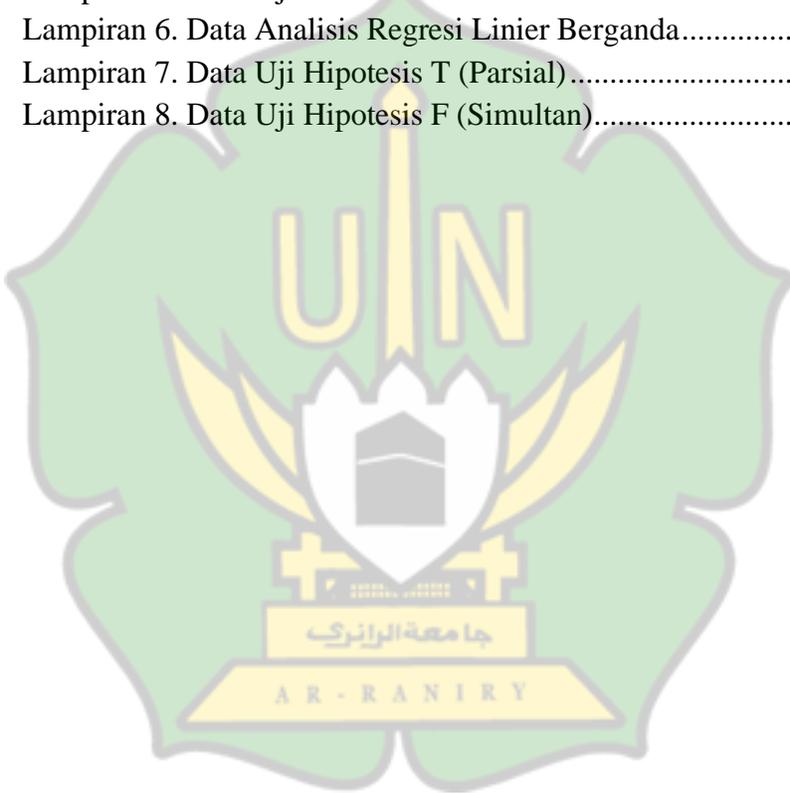
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Aceh Tahun 2017 – 2021 .....	4
Gambar 1.2 Persentase Tingkat Kemiskinan Aceh Timur Tahun 2017 – 2021 .....	5
Gambar 2.1 Vicious Circle of Poverty (Lingkaran Setan Kemiskinan) .....	19
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	56
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot .....	88
Gambar 4.2 Distribusi t tabel .....	92
Gambar 4.3 Distribusi F tabel .....	95



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Statistik Deskriptif .....	112
Lampiran 2. Data Uji Normalitas .....	113
Lampiran 3. Data Uji Multikolinearitas .....	114
Lampiran 4. Data Uji Autokorelasi .....	115
Lampiran 5. Data Uji Heteroskedastisitas .....	117
Lampiran 6. Data Analisis Regresi Linier Berganda.....	119
Lampiran 7. Data Uji Hipotesis T (Parsial).....	120
Lampiran 8. Data Uji Hipotesis F (Simultan).....	123



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah satu diantara banyak negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan kemiskinan yang serius. Selain itu, Indonesia juga memiliki populasi penduduk yang besar serta menempati peringkat keempat di dunia dengan sekitar 3,51 persen dari total populasi global. Selain kekayaan sumber daya alamnya seperti minyak, pertambangan, kekayaan bawah laut, gas berlimpah, perikanan, dan pertanian Indonesia juga terkenal dengan warisan budayanya yang kaya. Mengingat melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia, potensi ini seharusnya dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara. Ini menghadirkan peluang yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pembangunan berkelanjutan jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ini dikelola dengan baik (Huda, 2015:148).

Seperti diketahui, keadaan ekonomi saat ini cukup meresahkan. Di Indonesia, khususnya, ada sejumlah isu yang berkaitan dengan kehidupan komunal, seperti masalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dan kondisi masyarakat, terutama dari kelas menengah ke bawah, menimbulkan masalah ini. Kemiskinan terus menjadi salah

satu masalah tersulit dan terpenting yang dihadapi dunia saat ini, dan ini adalah fenomena sosial yang hadir di semua negara berkembang, termasuk Indonesia.

Salah satu negara yang masih menghadapi masalah kemiskinan serius adalah Indonesia, di mana kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyakit ekonomi. Secepat mungkin, kebijakan atau solusi harus dikembangkan untuk mengakhiri kemiskinan. Masyarakat yang tidak mampu mencapai kemakmuran ekonomi atau memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kualitas hidup di lokasi tertentu dianggap berada dalam kemiskinan (Subandi, 2016: 114). Kemiskinan adalah masalah serius yang sering mengkhawatirkan semua negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia, sampai pada titik di mana pemerintah masing-masing negara memusatkan perhatiannya padanya. Ketika seseorang tidak dapat mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai persyaratan dasar dari standar hidup tertentu, mereka dikatakan hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap sejumlah masalah terkait kesejahteraan, termasuk ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kondisi kehidupan yang terisolasi dan mengasingkan, ketergantungan, dan hambatan untuk mendapatkan layanan sosial. Kemiskinan adalah masalah yang sulit dan kompleks yang, jika tidak ditangani secara memadai, akan mengarah pada pembentukan masalah sosial tambahan. Untuk itu, langkah-langkah yang diambil untuk

mengurangi kemiskinan juga harus dilaksanakan secara utuh dan kohesif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan sangat penting.

Selain menjadi isu nasional, masalah kemiskinan di Indonesia mempengaruhi setiap kabupaten dan kota di Tanah Air. Ini juga meluas ke setiap daerah di Indonesia. Salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi adalah Provinsi Aceh. Selain itu, provinsi Aceh adalah salah satu yang menerima dana otonomi khusus yang cukup besar tetapi belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan, yang dianggap termasuk yang tertinggi di ujung pulau Sumatera.

Menurut data dari BPS provinsi Aceh, ini menjelaskan mengapa tingkat kemiskinan di wilayah ini berfluktuasi antara 2017 dan 2021 bahwa pada Maret 2017, tingkat kemiskinan Aceh adalah 16,89%, sedangkan pada September 2016, 15,92%, sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya. Sementara itu, kemiskinan Aceh pada 2021 meningkat dari 14,08% pada Maret menjadi 14,45% pada September. Informasi tambahan disertakan dalam bagan di bawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Persentase Tingkat Kemiskinan di Aceh Tahun 2017 – 2021**



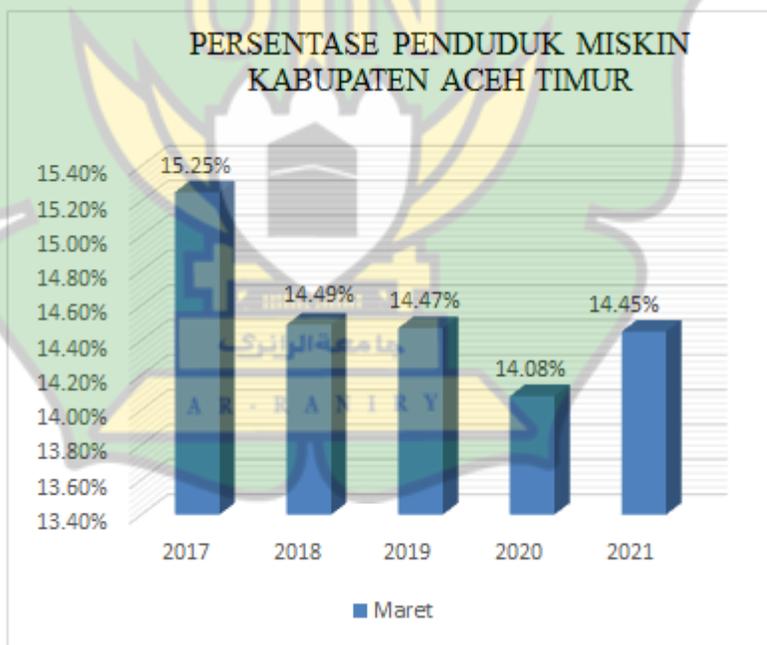
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Aceh ini juga tersebar ke seluruh kabupaten dan kota di setiap wilayah Provinsi Aceh; ini bukan hanya masalah daerah, tetapi masalah yang ada di semua kabupaten dan kota provinsi, termasuk satu di Aceh Timur. Selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur yang kaya minyak terletak di ujung timur Provinsi Aceh.

Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah sebesar 6.040,60 Km<sup>2</sup>, Secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 kecamatan, 54 mukim, 513 desa, 1 kelurahan dan 1.596 dusun. Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran

rendah, perbukitan, Sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0-308 m di atas permukaan laut. Komoditas unggulan Kabupaten Aceh Timur yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditas unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditas Kelapa Sawit, Kakao, Karet dan Kelapa. Sub sektor pertanian komoditas yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi kayu.

**Gambar 1.2**  
**Persentase Tingkat Kemiskinan Aceh Timur Tahun 2017 – 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Berdasarkan gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa data BPS Kabupaten Aceh Timur menjelaskan persentase masyarakat miskin sejak 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi, dimana tahun 2017 bulan Maret hingga 15,25%. Tahun 2018 bulan Maret hingga 14,47%. Selanjutnya pada tahun 2019 bulan Maret hingga 14,47%. Tahun 2020 bulan Maret hingga 14,08%. Dan Tingkat kemiskinan Aceh Timur pada tahun 2021 bulan Maret mencapai 14,45%.

Secara umum, pembentukan negara dilakukan untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Namun dalam perjalanannya, pemerintah akan disusul oleh isu utama yang mempengaruhi kesejahteraan penduduk, yaitu kemiskinan. Demikian pula, masalah kemiskinan di Indonesia tetap menjadi subjek penting untuk penyelidikan lebih lanjut. Hal ini terkait erat dengan tingginya tingkat kemiskinan Indonesia mengingat statusnya sebagai negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan serius di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Aceh Timur. Variabel ini mengacu pada kondisi di mana individu atau rumah tangga memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator, seperti tingkat pendapatan per kapita, tingkat akses pendidikan, atau indeks kemiskinan multidimensi. Kemiskinan memiliki dampak negatif yang luas terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk

akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pangan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur guna merancang kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah ini.

Salah satu faktor yang berpotensi berpengaruh pada kemiskinan yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Penelitian Erlinda Siagian menunjukkan hasil terdapat pengaruh positif dan signifikan PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2010-2016. Metode dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah federal akan memberikan pemerintah daerah sisa dana sehingga dapat melakukan yurisdiksinya. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan bagian regional dari bagi hasil pajak pusat terdiri dari Dana Perimbangan.

PAD adalah sumber pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Variabel ini mengacu pada jumlah pendapatan yang dihasilkan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur melalui berbagai sumber seperti pajak, retribusi, dan pendapatan dari SDA di wilayah tersebut. Pendapatan asli daerah

merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi masalah kemiskinan. Sesuai untuk tujuan hasil penelitian Siregar (2007) bahwa Paulus (2016), Isramirwati dan Rasuli (2017) dan Anwar, Palar dan Samual (2016) PAD berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. PAD menunjukkan salah satu penghasilan belanja daerah, Abdullah dan Halim (2004) menerangkan bahwa penghasilan pendapatan suatu daerah berupa PAD berpengaruh terhadap belanja suatu daerah secara menyeluruh. Jadi untuk tujuan bertambahnya penghasilan pendapatan suatu daerah dari PAD akan lebih membantu suatu daerah dalam melaksanakan anggaran yang berpihak pada penduduk miskin (*propoor budgeting*).

DAU adalah transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Variabel ini mengacu pada dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dana alokasi umum memiliki peranan penting dalam menyediakan sumber daya tambahan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Timur, untuk mengatasi masalah kemiskinan. Penelitian Paulus (2016) mengungkapkan bahwa DAU berpengaruh terhadap tingkat angka kemiskinan. Artinya peningkatan akan DAU akan mengurangi angka kemiskinan. Hasil penelitian Isramirwati dan Rasuli (2017) juga membuktikan bahwa

dana alokasi umum mampu mengurangi jumlah Kemiskinan dalam suatu daerah.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa “DAU pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan”. Diyakini bahwa pemerintah daerah akan dapat lebih efektif mengalokasikan PAD yang diterimanya untuk membayar pengeluaran daerah di daerahnya dengan transfer dana dari pusat. Pemerintah daerah mencerminkan dalam perkiraan APBD bahwa sumber pendapatan utama mereka untuk operasi sehari-hari sering kali ditransfer dari pemerintah federal. Tujuan dari transfer ini adalah untuk menjamin bahwa standar pelayanan publik minimal terpenuhi dan untuk mengurangi, jika tidak sepenuhnya menghilangkan, ketidakseimbangan ekonomi antara pemerintah (Pembab Aceh Timur 2023).

Sementara itu, DAU adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah bagi tujuan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur. Variabel ini merujuk pada dana alokasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur dan program-program kesejahteraan masyarakat. Dana alokasi khusus memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dengan menyediakan sumber daya tambahan yang diarahkan langsung ke daerah yang membutuhkan, seperti Kabupaten Aceh Timur. Hasil dari penelitian (Kadafi & Murtala, 2020) menunjukkan bahwa Dana

Otonomi Khusus tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan pada pemerintah Provinsi Aceh. Pada dasarnya pemerintah sudah mengupayakan untuk mengurangi tingkat angka Kemiskinan dinyatakan sebagai untuk tujuan memberikan otonomi khusus untuk suatu daerah juga mengalokasikan dana otonomi khusus. Tidak adanya pengaruh antara pemberian dana otonomi khusus dikarenakan penyaluran dan penggunaan dari dana tersebut belum tepat sasaran. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Rasu, Kumenaung & Koleangan (2019) menghasilkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dengan kata lain, peningkatan anggaran alokasi khusus akan mendorong pertumbuhan kemiskinan, dan sebaliknya.

Dengan anggaran daerah yang melayani kepentingan rakyat, pemerintah daerah mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat berdasarkan citra tersebut. Artinya, dengan mengalokasikan dana yang terkait langsung dengan isu-isu tersebut, peran pemerintah daerah dalam mempengaruhi kemiskinan melalui kebijakan APBD diantisipasi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan saat ini.

Terdapat beberapa gap penelitian yang dapat dieksplorasi dalam kajian tentang kemiskinan di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Timur. Pertama, penelitian dapat menganalisis hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor tertentu, seperti pendidikan, akses kesehatan, infrastruktur ekonomi, dan kebijakan pemerintah, dengan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Selanjutnya, penelitian juga dapat memfokuskan pada analisis sektoral untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial yang dapat membantu mengurangi kemiskinan, seperti pariwisata, pertanian, atau pengembangan industri lokal. Evaluasi kebijakan juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan program-program bantuan sosial.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus penelitian yang relevan, dengan menganalisis program-program pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi pentingnya pendekatan lintas sektoral dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi kemiskinan, serta mengidentifikasi model kemitraan yang efektif antara sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Melalui penelitian-penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pengambilan kebijakan dan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengkaji permasalahan penelitian terkait **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur?
4. Bagaimana pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur
4. Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti maupun bagi pembaca. Untuk peneliti di masa depan, sebagai sumber informasi

untuk membuat publikasi ilmiah baru, serta sumber referensi dan data tambahan untuk peneliti lain yang berminat pada bidang studi ini.

## 2. Manfaat Praktis

Mendapatkan pengetahuan tentang entitas sektor publik, terutama yang berkaitan dengan isu-isu yang secara langsung mempengaruhi pemerintah daerah. Masyarakat mungkin merasa lebih mudah untuk mengawasi dan mengatur kinerja pemerintah daerah sesuai dengan temuan penelitian khususnya di Kabupaten Aceh Timur dalam mengalokasikan pendapatan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan.

## 3. Manfaat Kebijakan

Pemerintah dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk memandu keputusan kebijakan yang bertujuan menurunkan kemiskinan. sebagai sumber daya bagi semua orang yang terlibat dalam strategi ini untuk belajar guna memaksimalkan efektivitasnya.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama yaitu bab pendahuluan. Pada bab ini diuraikan penjelasannya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua bab pembahasan teoritis. Pada bab ini nantinya dibahas mencakup teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian terkait, kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis. Teori-teori yang ingin dipakai menjadi dasarnya bahas tentang gambaran umum.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga yaitu bab metode penelitian. Di bab inilah bagian yang berisikan mengenai metode penelitian yang akan dipakai, jenis dan sumber data, sampel penelitian, serta variabel penelitian dan metode analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan bab yang membahas mengenai karakteristik responden, deskriptif variabel. Serta membahas dengan detail uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, hipotesis dan juga hasil penelitian pengaruh dari variabel X dengan variabel Y.

## BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi mengenai penutup, kesimpulan dan saran yang terdapat pada penelitian.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Kemiskinan**

Menurut Badan Pusat Statistik, ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan paling dasar seseorang, apakah itu berhubungan dengan makanan atau tidak, adalah apa yang dikenal sebagai kemiskinan. Di setiap bagian negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan adalah tantangan yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakmampuan untuk membayar tingkat kehidupan khas yang dinikmati oleh penduduk di daerah tertentu disebut sebagai kemiskinan. Ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seseorang, termasuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal, ditandai dengan kondisi ini. Kemampuan berpenghasilan rendah mempengaruhi kapasitas seseorang untuk mencapai persyaratan hidup standar, termasuk kesehatan masyarakat, standar pendidikan, kesejahteraan umum, dan pengangguran yang tinggi (Todaro, 2011:250).

Ketika mempertimbangkan kemiskinan dari berbagai perspektif, itu dapat dianggap sebagai masalah multifaset. Menurut Subandi (2016: 221), kemiskinan dapat dipandang sebagai gagasan yang terintegrasi dengan lima aspek: (1) kemiskinan (tepat dan geografis), (2) ketergantungan, (3) isolasi, (4) ketidakberdayaan, dan (5) kerentanan terhadap kondisi darurat (*state of emergency*). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau

kelompok untuk mempertahankan dan menciptakan eksistensi yang bermartabat sesuai dengan Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2015). Terwujudnya kesehatan sosial, pekerjaan, pangan, sandang, air bersih, pendidikan, sumber daya alam, tanah, dan lingkungan, tindakan kekerasan yang aman, rasa aman dari perlakuan, dan kemampuan menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial adalah contoh hak-hak dasar.

Todaro (2011:284), menjelaskan bahwa ada empat kategori untuk pola kemiskinan. Pertama, kemiskinan yang terus menurun disebut sebagai kemiskinan yang terus-menerus. Tipe kedua adalah kemiskinan siklus, yang didefinisikan sebagai kemiskinan yang umumnya mencerminkan siklus ekonomi. Pola ketiga adalah kemiskinan musiman, yang mengacu pada kemiskinan yang muncul secara musiman dalam konteks pertanian dan perikanan. Pola keempat, kemiskinan kecelakaan, mengacu pada kemiskinan yang dihasilkan dari insiden kekerasan, bencana alam, dan perang yang menurunkan standar hidup masyarakat.

#### **2.1.1.1 Karakteristik Penduduk Miskin**

Kemiskinan adalah tidak adanya seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun ada fitur lain yang bervariasi tergantung pada lokasi. Kemiskinan sumber daya alam (SDA), lingkungan sekitar, dan sumber daya manusia (SDM) diidentifikasi sebagai kondisi yang berbeda.

Todaro (2011:290), menjelaskan ciri-ciri penduduk miskin meliputi:

1. Secara umum, mereka kekurangan sumber daya tenaga kerja sendiri, modal, dan input produksi lainnya seperti tanah dan keterampilan.
2. Latar belakang pendidikan terbatas.
3. Mayoritas bekerja secara mandiri, untuk usaha kecil, setengah menganggur, atau menganggur.
4. Mayoritas dari mereka tinggal di daerah kumuh dan pedesaan.
5. Kurangnya kemandirian dalam memperoleh pangan, sandang, tempat tinggal, fasilitas kesehatan sosial lainnya, dan sembako.

#### **2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan**

Subandi (2016:79), menerangkan kemiskinan yang dialami negara-negara berkembang karena interaksi dari enam karakteristik meliputi:

1. Negara-negara berkembang memiliki tingkat pendapatan nasional yang relatif rendah dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang moderat.
2. Pendapatan per kapita sebagian besar negara Dunia Ketiga masih tertinggal, dengan beberapa bahkan mengalami stagnasi pertumbuhan.
3. Distribusi disparitas pendapatan yang sangat tidak merata.

4. Terus ditindas oleh kemiskinan ekstrem yang dialami sebagian besar orang di negara berkembang.
5. Ada banyak wabah penyakit, fasilitas yang tidak memadai, kekurangan tenaga kerja di sektor kesehatan, dan kekurangan gizi, yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian bayi di negara-negara terbelakang.
6. Materi kurikulum sudah usang dan instruksi tidak mencukupi; Hal ini terutama berlaku di negara-negara berkembang.

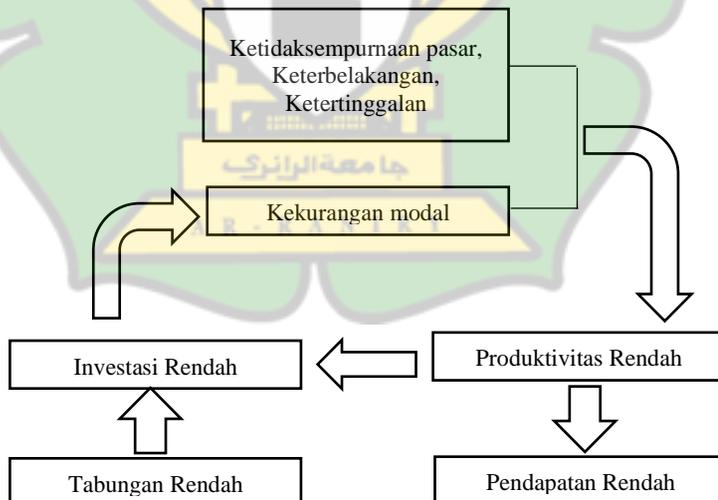
Subandi (2016:80), mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan seperti yang terlihat melalui lensa ekonomi. Pertama, kemiskinan dihasilkan dari pola kepemilikan sumber daya yang tidak setara, yang melahirkan kesenjangan pendapatan. Orang miskin memilikinya, bersama dengan sumber dayanya yang sedikit dan kualitasnya yang buruk.

Meningkatnya kemiskinan dalam kedua kasus tersebut merupakan akibat dari variasi kaliber SDM. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang langka menyebabkan rendahnya produktivitas, yang pada gilirannya menghasilkan gaji yang rendah. SDM berkualitas buruk dapat dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan, prasangka, keputusan, atau genetika. Ketiga, kesenjangan dalam akses terhadap modal adalah akar penyebab kemiskinan. Hipotesis siklus kemiskinan yang tidak pernah berakhir berasal dari tiga alasan kemiskinan ini. Ekonom pembangunan terkenal Nurkse mengusulkan tesis ini pada tahun

1953, menyatakan bahwa “negara miskin miskin karena miskin” atau “*a poor country is poor because it is poor*”.

Modal rendah adalah akar penyebab cacat, keterbelakangan, dan produksi rendah. Selain itu, gaji mereka dibatasi karena output mereka yang buruk. Pendapatan atau gaji yang diterima juga dipengaruhi oleh tabungan dan investasi yang buruk ini. Keterbelakangan akan dihasilkan dari investasi yang rendah. Dengan demikian, upaya dan energi yang cukup besar harus diarahkan untuk mengurangi kemelaratan agar dapat membebaskan diri dari siklus kemiskinan (Subandi, 2016: 86). Berikut gambaran “lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*)” meliputi:

**Gambar 2.1**  
***Vicious Circle of Poverty* (Lingkaran Setan Kemiskinan)**



Sumber: Nurkse (dalam Subandi, 2016:91)

Berikut ini adalah empat elemen yang berkontribusi terhadap terjadinya kemiskinan:

a. Rendahnya Pendidikan

Kurangnya pendidikan ini menghasilkan kemampuan terbatas untuk pertumbuhan pribadi dan penurunan jangkauan kesempatan kerja. Tingkat pendidikan yang rendah ini membatasi kapasitas seseorang untuk mencari dan menangkap peluang.

b. Rendahnya Kesehatan

Nutrisi dan kesehatan yang tidak memadai menyebabkan penurunan ketahanan fisik, dorongan, dan kemampuan kognitif.

c. Minimnya Lapangan Kerja

Pengangguran yang tinggi adalah masalah utama dalam kemiskinan karena hasil dari pekerjaan yang terbatas, dan membebaskan diri dari lingkaran setan kemiskinan ini sangat sulit.

d. Keadaan Terisolasi

Mayoritas masyarakat miskin adalah mereka yang tempat tinggalnya terisolasi dan jauh dari kota. Karena lokasinya yang terisolasi, ia merasa sulit untuk mengakses perawatan kesehatan, pendidikan, dan prospek kerja yang terbatas, oleh karena itu ia tidak mengalami tingkat kemajuan yang sama dengan orang lain.

### 2.1.1.3 Ukuran Kemiskinan

Subandi (2016:79), mengungkapkan bahwa semua indikator kemiskinan yang dianggap bergantung pada kriteria tertentu termasuk dalam garis kemiskinan. Ketika menentukan standar untuk mengukur kemiskinan, pola konsumsi memainkan peran penting. Jumlah permintaan tambahan yang sangat bervariasi, menunjukkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan standar gizi minimal dan kebutuhan mendasar lainnya untuk memenuhi pengeluaran yang diprediksi membentuk garis kemiskinan berbasis konsumsi. Orang-orang di lingkungan yang berpenghasilan kurang dari Rp 7.057 per orang per hari dianggap berada di bawah perkiraan garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang diproyeksikan, yang memperhitungkan kebutuhan non-makanan dan makanan, menghasilkan nilai harian sebesar Rp 7.057 untuk setiap individu. Setiap hari, setiap orang membutuhkan 2.100 kilokalori untuk kebutuhan makan dasar. Sedangkan kebutuhan akan perumahan, makanan, kesehatan, dan pendidikan tidak terkait dengan makanan.

Pengukuran kemiskinan, dijelaskan oleh BPS yaitu dengan ide *Head Count Index* (HCI-PO), artinya, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan. Individu dengan pengeluaran per kapita bulanan rata-rata di bawah ambang kemiskinan dianggap miskin. Menerapkan rumus perhitungan berikut:

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

dimana :

$\alpha = 0$

$z$  = Garis Kemiskinan

$y_i$  = pengeluaran rata-rata perkapita masyarakat sebulan dibawah garis kemiskinan

( $i = 1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = banyak masyarakat dibawah garis kemiskinan

$n$  = jumlah penduduk

Ada tiga kategori ukuran kemiskinan yang umum digunakan, yang meliputi:

#### 1. Kemiskinan Absolut

Ketika penghasilan seseorang tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dasarnya, mereka dikatakan hidup dalam kemiskinan. Tujuan dari gagasan ini adalah untuk menetapkan tingkat pendapatan minimal yang cukup untuk memastikan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Menentukan sifat dan tingkat kebutuhan minimal adalah tantangan utama dengan konsep kemiskinan absolut karena kedua variabel ini dipengaruhi oleh berbagai keadaan, termasuk iklim, tingkat perkembangan suatu negara, dan adat istiadat (Todaro, 2011:261).

## 2. Kemiskinan Relatif

Seseorang dalam situasi ini mampu memenuhi persyaratan dasarnya, namun ia masih jauh tertinggal dalam skema besar. Jika standar hidup di masyarakat berubah, garis kemiskinan juga akan bergeser, artinya konsep kemiskinan bersifat dinamis atau akan selalu ada. Kemudian, kemiskinan ada ketika ada kesenjangan sosial yang lebih tinggi antara si kaya dan si miskin, dan proporsi populasi yang lebih tinggi diklasifikasikan sebagai miskin (Subandi, 2016:80).

## 3. Kemiskinan Kultural

Seseorang dalam keadaan ini dikatakan malas dan lebih suka diam daripada bekerja untuk meningkatkan standar hidupnya; Dengan kata lain, dia miskin karena mentalitasnya sendiri, yang berasal dari kemalasannya.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **2.1.2.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Situngkir (2019), PAD adalah penerimaan daerah yang asalnya dari sumber asli daerah. Pasal 157 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 6 UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerangkan bahwasanya “sumber PAD terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah” (Manek & Badrudin, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan PAD yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan PAD lain yang sah, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Diperkirakan bahwa kenaikan PAD akan menghasilkan belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas layanan publik. Fenomena yang terjadi adalah bahwa kenaikan pendapatan asli daerah tidak disertai dengan peningkatan anggaran yang sesuai untuk pengeluaran daerah. Ini karena pendapatan asli daerah banyak digunakan untuk mendanai pengeluaran lain. PAD adalah sumber pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari berbagai aktivitas ekonomi di wilayahnya. PAD adalah salah satu komponen utama dalam keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Menurut UU No. 33 tahun 2014 pasal 1, “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebagai tanda desentralisasi, PAD bertujuan untuk memberikan pemerintah daerah kekuasaan untuk membiayai pembentukan otonomi daerah sejalan dengan kemampuan daerah (Tahar & Zakhiya, 2011).

Untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah federal, pemerintah daerah menggunakan PAD, sumber

asli pendapatan daerah yang diterima di daerah, sebagai modal dasar untuk membiayai pembangunan dan perusahaan daerah (Manek & Badrudin, 2016).

Undang-undang yang menetapkan PAD diterapkan di daerah di bawah bimbingan peraturan pemerintah daerah yang melarang memungut atau menggunakan sebutan selain yang ditentukan oleh undang-undang (Paseki et al., 2014).

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan desentralisasi fiskal. Pengalihan kewenangan pemerintah pusat ke daerah untuk tujuan mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai desentralisasi fiskal, sesuai kerangka hukum. Undang-undang memberi pemerintah federal wewenang untuk memberikan otoritas otonom kepada pemerintah daerah atas pengumpulan dan alokasi pendapatan untuk tujuan mengembangkan, menetapkan, dan melaksanakan prioritas pembangunan (Manek & Badrudin, 2016).

#### **2.1.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berikut adalah beberapa sumber PAD yang umum di Indonesia:

## 1. Pajak Daerah

Pajak Daerah: Pajak daerah mencakup berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak-pajak lainnya. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan tarif pajak dan mengumpulkan pendapatan dari pajak ini. Menurut Undang-Undang No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah “Pajak daerah sebagai bagian dari PAD adalah kontribusi yang diwajibkan dari orang pribadi atau badan yang terutang kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebagai kemakmuran masyarakat” (Manek & Badrudin, 2016).

Pajak daerah memainkan peran penting dalam bagaimana operasi pemerintah dilakukan. Fungsi pendapatan dan fungsi pengaturan adalah dua peran yang dapat dimainkan oleh pajak daerah. Peran ini dijelaskan di bawah ini: (DJPK, 2018).

### a. Fungsi Penerimaan

Tujuan utama pajak daerah adalah untuk mendukung kas daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah menggunakan fungsi penerimaan sebagai sarana menggalang dana dari masyarakat untuk berbagai

kebutuhan finansial. pertumbuhan lokal. Peran ini juga berfungsi untuk menunjukkan prinsip efisiensi, yang menyatakan bahwa pendapatan dari pengumpulan pajak daerah harus sama dengan jumlah pengeluaran paling sedikit.

b. Fungsi Pengaturan

Pajak daerah juga berfungsi untuk mengontrol atau mengatur. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan pajak daerah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kemampuan untuk mengendalikan pajak daerah dapat digunakan untuk mempengaruhi berapa banyak barang dan jasa tertentu yang dikonsumsi.

2. Retribusi Daerah: Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemberian izin atau penyediaan layanan tertentu kepada masyarakat atau perusahaan. Contoh retribusi daerah meliputi retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi jasa pelayanan kesehatan, dan retribusi lainnya;
3. Pendapatan dari Sumber Daya Alam: Jika daerah mempunyai potensi SDA seperti tambang, perkebunan, atau hutan, pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari kegiatan eksploitasi atau pengelolaan sumber daya alam tersebut. Pendapatan ini dapat berasal

dari royalti, pajak, atau bagi hasil yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang terkait dengan sumber daya alam;

4. Pendapatan dari Perusahaan Daerah: Pemerintah daerah juga dapat memiliki perusahaan atau badan usaha sendiri yang beroperasi di wilayahnya. Pendapatan dari perusahaan daerah dapat berasal dari kegiatan bisnis seperti perusahaan air minum, perusahaan listrik, atau perusahaan transportasi yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari berbagai sumber lainnya, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan dari kegiatan pariwisata, sumbangan atau hibah dari pihak ketiga, dan sumber pendapatan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai kebutuhan dan prioritas pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya (Anwar, Palar & Samual, 2016).

### **2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah**

Untuk memungkinkan pelaksanaan pengumpulan pajak yang efisien dan sukses, pajak daerah harus mematuhi sejumlah kriteria umum. Beberapa prinsip utama pajak yang baik diuraikan di sini, diambil dari berbagai prinsip perpajakan yang diterapkan secara teratur, meliputi (DJPK, 2018):

a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah, keseimbangan atas kemampuan subjek pajak didefinisikan sebagai mencegah diskriminasi dalam pemungutan pajak di antara wajib pajak dengan kemampuan serupa. Menurut prinsip ini, setiap masyarakat dengan keterampilan yang bervariasi memberikan kontribusi yang berbeda berdasarkan kemampuan masing-masing. Pemungutan pajak harus dilakukan terhadap semua subjek pajak sesuai dengan batasannya masing-masing.

b. Prinsip Kepastian

Ide ini menyoroti nilai kejelasan bagi wajib pajak serta sistem pengumpulan. Di antara banyak aspek pajak daerah yang perlu diketahui adalah undang-undang yang mengaturnya, subjek, objek, tarif, dan alasan di balik pelaksanaannya, serta tata cara pemungutannya. Karena semuanya dikontrol dengan jelas, setiap orang harus memenuhi komitmen mereka untuk membayar pajak daerah tanpa ragu-ragu. Inilah yang akan diberikan oleh keberadaan kepastian.

c. Prinsip Kemudahan

Gagasan ini menyoroti betapa pentingnya pembayar pajak daerah memenuhi tugas mereka pada waktu yang tepat. Ketika pembayar pajak daerah mendapatkan uang, pajak

daerah harus dikumpulkan. Dalam hal ini, jika masyarakat tidak memiliki sarana keuangan untuk membayar, negara tidak dapat memungut pajak daerah. Sebelum masyarakat dapat berkontribusi kepada daerah melalui pajak daerah, bahkan daerah harus menawarkan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang.

d. Prinsip Efisiensi

Prinsip tersebut menggarisbawahi perlunya pengumpulan pajak yang efisien, di mana biaya yang dikeluarkan dalam proses pengumpulan pajak tidak boleh melebihi jumlah total pajak yang diterima. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa pengumpulan pajak kota harus fokus pada metode yang memberikan pendapatan pajak paling banyak dengan biaya serendah mungkin.

#### **2.1.2.4 Fungsi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam konteks pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari Pendapatan Asli Daerah: (Wulandari & Iryanie, 2018)

1. Membiayai pembangunan daerah: Salah satu fungsi utama PAD adalah sebagai sumber pendanaan untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Dana yang diperoleh dari PAD digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi,

pariwisata, dan sektor-sektor lain yang berkontribusi pada perkembangan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Menunjang otonomi daerah: PAD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian keuangan daerah. Dengan memiliki sumber pendapatan sendiri, daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini mendorong terciptanya otonomi daerah yang lebih baik.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Dana yang diperoleh dari PAD dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Misalnya, dana tersebut dapat dialokasikan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk setempat.
4. Mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lain: Dengan memiliki sumber pendapatan yang cukup melalui PAD, daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada sumber pendapatan lain seperti dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini memberikan fleksibilitas dan stabilitas keuangan bagi daerah dalam melaksanakan program pembangunan jangka panjang.

5. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: Penggunaan dana PAD yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, melalui investasi pada sektor-sektor ekonomi potensial di daerah, seperti industri, pertanian, pariwisata, dan perdagangan. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Dalam kesimpulannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Selain sebagai sumber pendanaan, PAD juga dapat meningkatkan otonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lain, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan peningkatan PAD guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

#### **2.1.2.5 Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Aji, Kirya, & Susila, (2018), indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan berperan sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah. Pendapatan yang diperoleh melalui PAD dapat bervariasi setiap tahunnya, sehingga berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk mengukur variabel PAD, dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan skala rasio. Pendekatan ini memperhitungkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan beberapa faktor terkait, seperti Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, atau luas wilayah daerah. Dengan demikian, perhitungan rasio ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana PAD berkontribusi terhadap faktor-faktor tersebut.

Pengukuran PAD dengan menggunakan skala rasio dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan merencanakan pembangunan. Dengan memantau perubahan rasio PAD dari waktu ke waktu, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tren pertumbuhan atau penurunan PAD, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui upaya pengelolaan kekayaan yang lebih efektif.

Namun, penting untuk diingat bahwa pengukuran PAD dengan skala rasio hanya merupakan salah satu metode yang digunakan, dan terdapat berbagai faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam mengukur dan menganalisis PAD secara menyeluruh.

Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran PAD dapat dilakukan dengan perhitungan

PAD = Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Adisasmita (2016:101), indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah: Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset-aset atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya, pendapatan dari penyewaan aset daerah, hasil penjualan tanah milik daerah, atau pendapatan dari perusahaan daerah.
2. Hasil retribusi daerah: Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pungutan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak ketiga. Contohnya, pendapatan dari retribusi parkir, retribusi pasar, atau retribusi izin usaha.
3. Hasil pajak daerah: Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat atau pihak ketiga. Contohnya, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, atau pajak restoran.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: Merupakan pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori hasil pengelolaan kekayaan daerah, hasil retribusi daerah, atau hasil pajak daerah, namun secara sah diakui sebagai

Pendapatan Asli Daerah. Contohnya, pendapatan dari sanksi administrasi, pendapatan dari perjanjian kerja sama, atau pendapatan dari sumbangan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan dana hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. PAD diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Tingkat PAD yang diperoleh sangat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena PAD merupakan salah satu sumber pendanaan utama untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

### **2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)**

#### **2.1.3.1 Definisi Dana Alokasi Umum (DAU)**

Ahmad (2019: 142) menerangkan tujuan DAU, yang diambil dari keuntungan APBN, adalah untuk mendistribusikan sumber daya keuangan antar daerah secara adil untuk mendukung kebutuhan lokal sambil memberlakukan desentralisasi. Menurut Kuncuro (2014), DAU adalah "*block grant*" yang berarti bahwa daerah diberi wewenang untuk membelanjakannya sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka untuk meningkatkan layanan masyarakat sambil mempraktikkan otonomi daerah. Dinyatakan berbeda, tujuan alokasi DAU adalah untuk mendistribusikan kapasitas secara adil untuk memberikan layanan publik di antara pemerintah daerah Indonesia.

Menurut UU No. 33 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, bahwa “DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN” (Ismail & Hakim, 2014).

Pasal 37 ayat 3 dan ayat 4 PP No. 55/2005 menjelaskan “dalam hal menentukan proporsi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, proporsi ditetapkan dengan kapasitas 10% dan 90%” (Kemenkeu, 2016).

Pengertian alokasi dasar dan kesenjangan anggaran digunakan dalam perhitungan alokasi DAU untuk masing-masing daerah. Kesenjangan fiskal adalah perbedaan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah, sedangkan perhitungan alokasi dasar hanya digunakan untuk mengukur pengeluaran daerah dan tidak dimaksudkan untuk membayar upah atau gaji kepada PNSD. Badan statistik pemerintah atau lembaga pemerintah yang berwenang mempublikasikan data yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan sumber data perhitungan DAU (DJPK, 2019).

Struktur APBN, DAU dan DBH adalah kelompok jenis Dana Transfer Umum (DTU). Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, “Pemerintah mengarahkan dalam pengalokasian DTU minimal sebesar 25% digunakan untuk belanja

infrastruktur daerah yang dapat berpengaruh langsung terhadap percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” (DJPk,2019).

DAU adalah “*block grant*” yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan mereka dan kebutuhan keuangan mereka. Ini didistribusikan sesuai dengan formula yang mengikuti pedoman khusus, umumnya menunjukkan bahwa daerah terbelakang dan miskin harus menerima bagian yang lebih besar daripada yang kaya. Dinyatakan berbeda, tujuan utama alokasi. DAU beroperasi dalam sistem Indonesia untuk mendistribusikan kapasitas pemberian layanan publik di seluruh pemerintah daerah secara adil (Fauzan, 2006).

#### **2.1.3.2 Tahapan-Tahapan Menghitung Dana Alokasi Umum**

Mekanisme pengalokasian DAU menurut DJPK (2016) meliputi beberapa tahap yaitu:

1. Tahapan Akademis

Kelompok akademisi otonom dari berbagai universitas menyelesaikan tahap pertama dari proses penyusunan kebijakan Dana Alokasi Umum, memastikan bahwa itu

sesuai dengan persyaratan otonomi daerah dan ketentuan hukum Indonesia.

## 2. Tahapan Administratif

Saat ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sebuah divisi dari Kementerian Keuangan, sedang mengumpulkan dan memvalidasi data dari entitas terkait yang memberikan informasi dasar yang diperlukan untuk menghitung DAU untuk memastikan bahwa itu terkini dan asli.

## 3. Tahapan Teknis

Tahap teknis perhitungan DAU yang akan dikonsultasikan adalah tahap percobaan. Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, pemerintah hingga DPR RI dilaksanakan dengan menggunakan rumus DAU dengan tetap mempertanggungjawabkan temuan rekomendasi akademik.

## 4. Tahapan Politis

Tahap terakhir adalah tahap politik. Pembahasan mengenai perhitungan dana alokasi umum dilakukan antara pemerintah dan DPRD RI dalam rangka konsultasi dan persetujuan hasil dana tersebut.

### **2.1.3.3 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum**

Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, “DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar”. Kesenjangan fiskal terjadi ketika kemampuan fiskal

suatu daerah mengurangi permintaannya. Dana Alokasi Umum ditentukan dengan mempertimbangkan jenis-jenis berikut: (DJPk, 2019).

1. Data untuk perhitungan alokasi dasar Perhitungan alokasi dasar meliputi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (termasuk THR dan gaji ke-13 non Tukin/TPP) dan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
2. Data untuk perhitungan kebutuhan fiskal meliputi :
  - a). Total Belanja Rata-Rata.
  - b). Jumlah Penduduk.
  - c). Luas Wilayah Darat.
  - d). Luas Wilayah Laut.
  - e). Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
  - f). Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
  - g). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
3. Data perhitungan kapasitas fiskal yaitu:
  - a). Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - b). Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam.
  - c). DBH Pajak.
4. Berikut ini menjelaskan penyedia data yang digunakan untuk menghitung DAU yang didistribusikan ke suatu wilayah: (Kemenkeu, 2016).

Alokasi dasar

- a). Gaji PNSD : Daerah dan kemenkeu.
- b). Formasi PNSD : Kemenpan-RB (Reformasi Birokrasi).

Kebutuhan fiskal

- a). Jumlah penduduk : Kemendagri/BPS.
- b). Luas wilayah :  
Kemendagri dan BIG (badan informasi geospasial).
- c). IKK: BPS.
- d). IPM : BPS.
- e). PDRB Perkapita : BPS dan Kemendagri.
- f). TBR : Daerah dan Kemenkeu.

Kapasitas fiskal

- a). PAD : Daerah dan Kemenkeu.
- b). DBH pajak : Kemenkeu.
- c). DBH SDA : Kemenkeu.

#### **2.1.3.4 Peran Dana Alokasi Umum**

Peran Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di Indonesia. DAU merupakan bagian dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah dalam konteks desentralisasi.

Dengan adanya DAU, pemerintah pusat berupaya mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah yang bisa terjadi akibat disparitas pendapatan dan potensi ekonomi antar daerah. DAU diberikan berdasarkan penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Formula tersebut mencakup beberapa variabel seperti jumlah penduduk, luas

wilayah, tingkat kemiskinan, tingkat ketergantungan terhadap sektor tertentu, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Dengan menggunakan formula tersebut, alokasi DAU dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan yang lebih adil dan proporsional kepada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya atau kesulitan dalam menghasilkan pendapatan sendiri.

Melalui DAU, pemerintah daerah dapat memperoleh sumber pendanaan tambahan yang diperlukan untuk pembangunan dan penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan di tingkat daerah. DAU juga membantu mendorong pembangunan ekonomi regional, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik di daerah.

Pengembangan dan modifikasi DAU terus dilakukan untuk memperbaiki mekanisme alokasi dan memastikan bahwa dana tersebut dapat mencapai tujuan pemerataan yang diinginkan. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan formula alokasi DAU, serta memperhatikan dinamika dan kebutuhan daerah dalam proses pengalokasian dana tersebut (Sidik & dan Masyarakat, 2016).

### **2.1.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh setiap daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Alokasi dasar: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besaran DAU. Alokasi dasar ini mencerminkan kebutuhan keuangan daerah dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan bagi PNS.
2. Jumlah penduduk: Besarnya populasi atau jumlah penduduk suatu daerah juga menjadi pertimbangan dalam perhitungan DAU. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, semakin besar pula kebutuhan keuangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Luas wilayah daerah: Luas wilayah sebuah daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi alokasi DAU. Daerah dengan wilayah yang luas mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya dalam hal infrastruktur, transportasi, dan pengelolaan wilayah.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Besaran Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah setiap tahun juga dapat mempengaruhi alokasi DAU. Daerah yang memiliki PAD yang besar cenderung mendapatkan DAU yang lebih

kecil karena memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik untuk membiayai kebutuhan daerah.

5. Dana Bagi Hasil (DBH): DBH yang diperoleh dari pemerintah pusat juga menjadi faktor yang mempengaruhi alokasi DAU. DBH merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam dan sektor-sektor tertentu, seperti migas atau pertambangan. Besaran DBH yang diterima oleh sebuah daerah akan memengaruhi alokasi DAU yang diterima.

Pemerintah menggunakan faktor-faktor di atas untuk melakukan perhitungan dan pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah. Tujuan utama dari penggunaan faktor-faktor tersebut adalah untuk mencapai pemerataan dan keadilan dalam pembagian dana antar daerah.

#### **2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

##### **2.1.4.1 Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Abdul Halim (2007) menguraikan bagaimana uang DAK, yang didistribusikan ke daerah untuk membantu membayar kebutuhan tertentu, merupakan sumber daya yang diambil dari anggaran negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menjelaskan “DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD)”. DAK

sangat penting bagi dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sejalan dengan prinsip desentralisasi, pemerintah daerah kini memikul akuntabilitas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurut beberapa sudut pandang tersebut di atas, DAK didefinisikan sebagai uang yang diambil dari APBN dan diberikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu yang disebarkan oleh pemerintah federal sesuai dengan peraturan APBN.

Adapun Peran DAK yang akan dialokasikan yaitu:

1. Untuk membantu menyediakan dana untuk inisiatif unik yang termasuk dalam keprihatinan lokal dan selaras dengan tujuan nasional.
2. Mendukung daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan esensial, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan prasarana (jalan, jembatan, irigasi, air minum, dan sanitasi).
3. Untuk aturan khusus yang diuraikan dalam ketentuan hukum dan peraturan.

#### **2.1.4.2 Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus**

Menurut situs web ([djpk.kemenkeu](http://djpk.kemenkeu)), kriteria pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) meliputi:

1. Kriteria Umum: Kriteria ini dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari

penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Dengan kata lain, kriteria ini mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK.

2. Kriteria Khusus: Kriteria ini dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik khusus dari daerah tersebut. Otonomi khusus merujuk pada daerah-daerah yang memiliki kewenangan dan karakteristik unik yang membedakannya dari daerah lain. Kriteria ini mempertimbangkan kebutuhan khusus dan karakteristik daerah yang bersangkutan dalam pengalokasian DAK.
3. Kriteria Teknis: Kriteria ini disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai melalui DAK. Kriteria ini melibatkan penentuan indikator kegiatan yang akan mendapatkan dukungan dana dari DAK, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau sektor-sektor lain yang menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan daerah.

Penggunaan kriteria-kriteria tersebut membantu pemerintah dalam menentukan alokasi dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan daerah

serta mendorong pemerataan pembangunan antar daerah di Indonesia.

#### **2.1.4.3 Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus**

Dikutip dari situs web ([djpk.kemenkeu](http://djpk.kemenkeu)), pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) melibatkan dua tahapan dalam menghitung alokasi DAK, yaitu:

1. Penentuan Daerah Penerima DAK: Pada tahap ini, dilakukan penentuan daerah-daerah tertentu yang akan menerima DAK. Penentuan ini dapat didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, seperti daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, daerah dengan infrastruktur yang belum memadai, atau daerah dengan kebutuhan khusus lainnya. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebijakan pemerintah dan tujuan dari DAK tersebut.
2. Penentuan Besaran Alokasi DAK Masing-masing Daerah: Setelah daerah penerima DAK ditetapkan, dilakukan penentuan besaran alokasi DAK yang akan diterima oleh masing-masing daerah. Penentuan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti karakteristik daerah, kebutuhan khusus, potensi pengembangan, dan indikator-indikator kegiatan yang akan didanai melalui DAK. Selain itu, kriteria umum yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah juga dapat digunakan dalam menghitung besaran alokasi DAK.

Proses penghitungan alokasi DAK tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan dengan adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah penerima. Melalui penggunaan kriteria dan tahapan yang jelas, diharapkan DAK dapat memberikan dampak yang positif dalam pembangunan daerah dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

#### **2.1.4.4 Kebijakan Dana Alokasi Khusus**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 mengatur tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan DAK yang spesifik termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

1. Prioritas untuk Daerah dengan Kemampuan Keuangan Rendah: DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional. Tujuannya adalah untuk mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah.
2. Peningkatan Pembangunan di Daerah Tertentu: DAK digunakan untuk menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir, pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

3. Peningkatan Produktivitas dan Diversifikasi Ekonomi: DAK mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Infrastruktur: DAK bertujuan meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana: DAK bertujuan menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, serta mempercepat penyediaan, meningkatkan cakupan, dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Dukungan dalam Dampak Pemekaran Daerah: DAK mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Keterpaduan dan Sinkronisasi Kegiatan: DAK bertujuan meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang

didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai oleh anggaran kementerian/lembaga dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

8. Alih Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan: Secara bertahap, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dialihkan untuk mendanai kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran departemen pekerjaan umum, departemen pendidikan nasional, dan departemen kesehatan.

Keputusan tersebut mengatur prinsip-prinsip dan arah kebijakan pengalokasian DAK untuk memastikan adanya pendanaan yang tepat dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

#### **2.1.4.5 Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK)**

1. Masih banyak wilayah tertinggal, di mana kemampuan kawasan untuk membayar semua biayanya lebih rendah. DAK berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur dan sarana fisik yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
2. Pembangunan yang tidak merata, di mana DAK mendorong pembangunan infrastruktur dan utilitas di daerah tertinggal lebih cepat.
3. Masih banyaknya pengangguran, Melalui inisiatif khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan,

infrastruktur, dan bidang lainnya, DAK bertujuan untuk mempromosikan produksi yang lebih besar, perluasan lapangan kerja, dan ekonomi yang beragam terutama di daerah pedesaan untuk menurunkan pengangguran.

## 2.2 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan upaya peneliti untuk menarik kesejajaran sebelum menemukan ide-ide segar untuk penelitian tambahan; Selain itu, studi sebelumnya mendukung penempatan penelitian dan menyoroti orisinalitasnya, temuan penelitian terkait sangat diperlukan dalam memperkuat hasil penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh penulis. Dengan adanya penelitian terkait, maka penulis dapat melihat bagaimana hasil yang diperoleh berdasarkan acuan penelitian terkait seperti pada Tabel dibawah:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Nama/Judul/Tahun	Variabel	Metode Analisa	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1.	Fikri, Usep Sudrajat, dan Yudha Remofa/ "Pengaruh PAD,DAU, dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu" (2019)	PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), dan DAK ( $X_3$ ), Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ), Kemiskinan ( $Y_2$ )	Kuantitatif (Regresi Linear Berganda)	(1) PAD, DAU, DAK baik secara parsial maupun secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan	Persamaan : <i>variable X</i> yang digunakan sama, metode penelitian  Perbedaan : penelitian ini menggunakan dua variabel Y, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti

No	Nama/Judul/Tahun	Variabel	Metode Analisa	Hasil	Persamaan & Perbedaan
				ekonomi.	menggunakan satu <i>variable</i> Y
2.	Paulus, Koleangan, dan Engka “Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah di Kota Bitung” (2019)	PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), dan DAK ( $X_3$ ), Kemiskinan ( $Y$ ), Belanja Daerah ( $Z$ )	Kuantitatif (Regresi Linear Berganda)	Hubungan antara PAD, DAU, DAK terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah adalah hubungan negatif. Sedangkan secara keseluruhan diketahui bahwa jika terjadi Kenaikan 1 % pada Belanja Daerah maka akan terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 0.1856 persen	Persamaan : variabel X dan Y yang digunakan sama, metode penelitian  Perbedaan : penelitian ini menggunakan variabel moderasi
3.	Kadafi & Murtala/ Pengaruh Pendapatan Asli	PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ),	Kuantitatif (Regresi Linear	(1) PAD belum memberi	Persamaan : <i>variable</i> X dan Y digunakan

No	Nama/Judul/Tahun	Variabel	Metode Analisa	Hasil	Persamaan & Perbedaan
	Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017/ (2020).	DAK ( $X_3$ ), Kemiskinan ( $Y$ )	Berganda)	kan dampak terhadap pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh (2) DAU telah memberikan dampak terhadap pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh (3) DOK belum memberikan dampak terhadap pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh	sama, metode penelitian  Perbedaan : lokasi penelitian
4.	Rasu, Kumenaung, & Koleangan/ Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota	PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ), DBH ( $X_4$ ), Tingkat Kemiskinan ( $Y$ )	Kuantitatif (Regresi Linear Berganda)	PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Persamaan : variabel $Y$ yang digunakan sama, metode penelitian  Perbedaan : penelitian ini menggunakan

No	Nama/Judul/Tahun	Variabel	Metode Analisa	Hasil	Persamaan & Perbedaan
	Manado (2021).			an. DAU berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. DAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.	4 variabel X sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan 3 variable X
5.	Fitriyanti & Handayani/ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)/ (2021).	PAD ( $X_1$ ), DAK ( $X_2$ ), Belanja Daerah ( $X_3$ ), Tingkat Kemiskinan ( $Y$ )	Kuantitatif (Regresi Linear Berganda)	Hasil penelitian menunjukkan PAD, DAK berpengaruh negatif signifikan akan penurunan angka Kemiskinan. Secara simultan PAD, DAK, dan Belanja Daerah	Persamaan : <i>variable</i> Y yang digunakan sama, metode penelitian  Perbedaan : Variabel X yang digunakan berbeda, penelitian ini menggunakan <i>variable</i> PAD ( $X_1$ ), DAK ( $X_2$ ), Belanja Daerah ( $X_3$ ). Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan variabel PAD

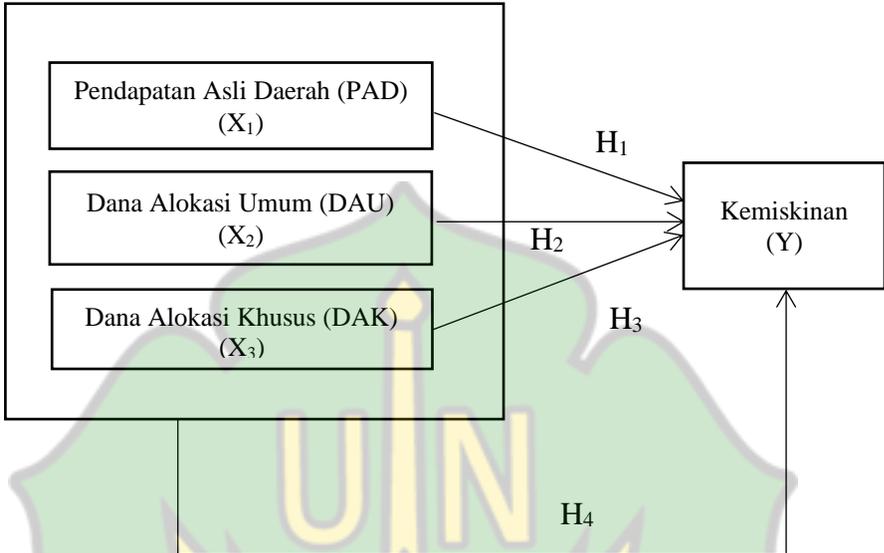
No	Nama/Judul/Tahun	Variabel	Metode Analisa	Hasil	Persamaan & Perbedaan
				berpengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan	( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ).
6.	Riza Amami dan Kiki Asmara/ “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan BM terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi”/ (2022)	PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), dan DAK ( $X_3$ ), BM ( $X_4$ ) Kemiskinan ( $Y$ )	Kuantitatif (Regresi Linear Berganda)	PAD tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan DAK tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.	Persamaan : variabel $Y$ yang digunakan sama dengan metode penelitian  Perbedaan : penelitian ini menggunakan 4 variabel $X$ , sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan 3 <i>variable X</i> .
7.	Dimas Febrianto, Muchtolifah “Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening di Provinsi Jawa	PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), dan DAK ( $X_3$ ), Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ), Kemiskinan	Kuantitatif (Regresi Linear Berganda)	PAD, DAU memiliki pengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap	Persamaan : <i>variable X</i> dan $Y$ digunakan sama metode penelitian  Perbedaan : penelitian ini menggunakan variabel

No	Nama/Judul/Tahun	Variabel	Metode Analisa	Hasil	Persamaan & Perbedaan
	Barat <sup>7</sup> / (2022)	an (Z)		pertumbuhan ekonomi sedangkan DAK memiliki pengaruh langsung positif dan tidak signifikan. PAD, DAU, dan DAK melalui kemiskinan memiliki pengaruh secara tidak langsung negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	intervening.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan kerangka pikir yang disebutkan di atas:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hubungan antar Variabel

### 2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur

PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber-sumber di dalam wilayah, termasuk pendapatan asli yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan kekayaan yang dipisahkan di dalam wilayah, dan sumber-sumber lainnya. Pengaruh PAD terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur dapat bervariasi, tergantung pada sejumlah faktor dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Peningkatan PAD dapat memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan jika pendapatan yang dihasilkan

digunakan dengan tepat dan efisien untuk membiayai program-program pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Misalnya, pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan tersebut untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program-program sosial lainnya yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain itu, peningkatan PAD juga dapat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperluas program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Misalnya, melalui program pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Namun, pengaruh PAD terhadap kemiskinan juga dapat terbatas jika tidak ada kebijakan yang tepat dalam pengalokasian dan penggunaannya. Jika pendapatan yang dihasilkan tidak disebarluaskan secara merata atau tidak diarahkan untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, maka pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan dapat terbatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur untuk mengelola PAD dengan baik. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, pengawasan yang efektif, serta kebijakan yang berorientasi pada

pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Manek (2016), tentang pengaruh PAD dan perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Isramiwarti (2017), dalam penelitiannya tentang pengaruh PAD, DAU, Dana Bagi Hasil, dan rasio penduduk terhadap kemiskinan, menggunakan belanja daerah sebagai faktor mediasi, menemukan bahwa PAD melalui Belanja Daerah memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan penelitian Oktaviani (2018), tentang pengaruh pinjaman daerah dan PAD terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

#### **2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur**

DAU merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari transfer keuangan pusat ke daerah. Pengaruh DAU terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur juga dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor dan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Peningkatan DAU dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan jika dana tersebut digunakan

dengan efektif dan efisien untuk membiayai program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur dapat menggunakan DAU untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program-program sosial lainnya yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain itu, peningkatan DAU juga dapat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Dengan mengalokasikan dana tersebut untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program-program pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah dapat membantu masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Namun, seperti halnya dengan PAD, pengaruh DAU terhadap kemiskinan dapat terbatas jika tidak ada kebijakan yang tepat dalam pengalokasian dan penggunaannya. Jika dana tersebut tidak diarahkan secara efektif untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, maka pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan dapat terbatas.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur untuk mengelola DAU dengan baik. Hal ini melibatkan perencanaan yang cermat, pengawasan yang ketat, serta kebijakan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga

perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang didanai oleh DAU guna memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Penelitian Syahidin (2020) menemukan bahwasannya terjadi hubungan negatif antara Dana Alokasi Umum terhadap kemiskinan, sehingga keterkaitan yaitu jika Dana Alokasi Umum meningkat maka terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Sedangkan dari hasil penelitian Wijaya, Arifin, & Hadi (2018) menemukan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif sebesar 0.18. Dana Alokasi Umum tidak efektif dan tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan pada Kab/Kota di provinsi Jawa Timur. Karena adanya arah yang positif berarti dengan meningkatnya variabel Dana Alokasi Umum akan menambah angka kemiskinan.

Hasil penelitian Rasu, Kumenaung & Koleangan (2019) mengungkapkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Berarti, kemiskinan akan meningkat seiring dengan peningkatan dana alokasi umum, dan sebaliknya. Ini bertentangan dengan gagasan bahwa kemiskinan dan dana alokasi umum berkorelasi negatif. Pusat ini menyediakan uang alokasi umum, yang diharapkan dapat digunakan untuk inisiatif dan acara yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Ketika sebuah komunitas mengalami kemajuan ekonomi, maka pendapatan individu meningkat bersamaan, memungkinkan masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan fundamentalnya dan mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan.

#### **2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur**

DAK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah tertentu. Pengaruh DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur dapat menjadi faktor penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Peningkatan DAK dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan jika dana tersebut digunakan dengan tepat dan efisien untuk membiayai program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi, dan program-program sosial lainnya yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

DAK dapat difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan, seperti program-program bantuan sosial, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan menggunakan DAK

secara tepat sasaran, pemerintah daerah dapat membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun, pengaruh DAK terhadap kemiskinan juga dapat terbatas jika tidak ada perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang efektif dalam penggunaan dana tersebut. Penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur untuk memiliki kebijakan yang jelas dan transparansi dalam pengalokasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan DAK agar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang didanai oleh DAK. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program-program yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Timur.

Dalam kesimpulannya, pengaruh DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur dapat signifikan jika dana tersebut dikelola dengan baik, digunakan untuk program-program yang tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan terpadu, DAK dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Hasil penelitian Rasu, Kumenaung & Koleangan (2019) mengungkapkan bahwa variabel DAK berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Berarti, meningkatnya tingkat dana alokasi khusus akan mendorong meningkatnya tingkat kemiskinan dan sebaliknya. Halim (2002:65), menjelaskan bahwa DAK adalah dana yang dialokasikan APBN ke berbagai daerah untuk membantu pembiayaan kebutuhan khusus. Penggunaan DAK difokuskan pada kegiatan investasi yang berkaitan dengan penciptaan, akuisisi, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk perolehan fasilitas fisik tambahan. Distribusi DAK diperkirakan akan berdampak pada distribusi anggaran belanja modal, karena DAK cenderung meningkatkan aset tetap milik pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik (Ardhani 2011). Penelitian lain oleh Permanasari (dalam Rasu, Kumenaung & Koleangan 2019) yang mengungkapkan bahwa DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### **2.4.4 Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur**

Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur sangat penting dan saling terkait. Ketiga sumber pendapatan tersebut dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan kemiskinan jika digunakan secara efektif dan efisien

untuk membiayai program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

PAD: Peningkatan PAD dapat memberikan sumber dana yang lebih besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur. Jika dikelola dengan baik, PAD dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program-program pemberdayaan ekonomi. Penggunaan PAD yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

DAU: DAU yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur juga dapat memberikan kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan. DAU dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. Dengan mengalokasikan DAU secara tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang dapat membantu mengurangi kemiskinan.

DAK: DAK dapat menjadi sumber dana tambahan yang digunakan untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. DAK sering kali ditujukan untuk program-program khusus yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial dasar. Dengan menggunakan DAK

secara efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat memperkuat program-program yang telah ada dan mengimplementasikan inisiatif baru yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan pengurangan kemiskinan tidak hanya tergantung pada besarnya PAD, DAU, atau DAK yang diterima, tetapi juga pada pengelolaan yang baik, perencanaan yang matang, pengawasan yang efektif, serta kebijakan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut juga merupakan faktor penting untuk mencapai hasil yang optimal.

Menurut Jolianis (2016), dalam penelitiannya yang menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, kesimpulannya ialah PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dalam penelitian Paulus, Koleangan, & Engka, (2019) Dalam memverifikasi analisis jalur, data deret waktu dari tahun 2005 hingga 2015 diproses menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif antara PAD, DAU, dan DAK dengan kemiskinan yang diukur dengan belanja daerah. Sedangkan Belanja Daerah Kota Bitung memberikan kontribusi sebesar 0,6216 persen, DAU 4,7930 persen, dan 0,2101 persen terhadap penurunan kemiskinan sebesar 1 persen. Secara umum, bagaimanapun, diketahui bahwa

peningkatan satu persen dalam pengeluaran daerah akan menghasilkan penurunan 0,1856% dalam tingkat kemiskinan.

## 2.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah solusi sementara untuk masalah penelitian yang harus divalidasi melalui respons yang berasal dari temuan penelitian. Pada penelitian ini nantinya dirumuskan hipotesis fungsi memberi arahan dan pedoman saat melaksanakan penelitiannya. Hipotesis yang diajukan pada penelitian yakni sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.
- H<sub>2</sub> : Diduga terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.
- H<sub>3</sub> : Diduga terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.
- H<sub>4</sub> : Diduga terdapat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain penelitian**

Desain penelitian ini mencakup lingkup wilayah penelitian dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis korelasional untuk menginvestigasi dampak dari tiga variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X2), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3), terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur (Y). Metodologi penelitian ini bersifat kuantitatif, karena semua data yang digunakan, mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi data dan kesimpulan analisis, dinyatakan dalam bentuk data numerik. Dalam penelitian ini, tujuan dari analisis kuantitatif adalah mengevaluasi teori-teori tertentu dengan memeriksa korelasi antara variabel-variabel yang diteliti. Lingkup wilayah penelitian adalah pemerintah daerah kabupaten Aceh Timur.

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah informasi tangan kedua yang sudah dikumpulkan oleh beberapa orang (organisasi) untuk tujuan tertentu dan tersedia untuk berbagai penelitian. Data sekunder tersebut tidak murni dalam karakter dan telah menjalani treatment setidaknya satu kali. Contoh data sekunder adalah data yang diperoleh dari Biro Pusat

Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumen Kabupaten Aceh Timur dalam angka dan data kemiskinan yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 hingga 2021.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan pendekatan tinjauan literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur. Data tersebut berupa informasi keuangan yang dinyatakan dalam bentuk numerik. Selain itu, data kemiskinan digunakan sebagai variabel dependen dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. Rentang waktu pengambilan data meliputi tahun 2017 hingga 2021. Informasi tersebut dapat diakses melalui situs resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur.

### **3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

Definisi operasional variabel ialah penjabaran masing-masing variabel terdapat indikator-indikator yang membentuknya. Dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas (*independent*) yaitu PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), dan DAK ( $X_3$ ), sedangkan variabel terikat (*dependent*) yaitu Kemiskinan ( $Y$ ). Operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Penelitian**

No.	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
1.	PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah federal, pendapatan asli daerah, atau PAD, adalah sumber asli pendapatan daerah yang dihasilkan di wilayah tersebut. Ini digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai perusahaan dan pertumbuhan daerah (Manek & Badrudin, 2016).	$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS$  Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah HPD = Hasil Pajak Daerah RD = Retribusi Daerah PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah  (Purwanto Fiona, 2013:38)	Rasio
2.	DAU (Dana Alokasi Umum)	Menurut Ahmad (2019: 142) DAU ialah dana yang diciptakan dari pendapatan anggaran negara yang dimaksudkan	$DAU = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$  Keterangan : Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal	Rasio

		untuk mendistribusikan sumber daya keuangan antar daerah secara adil untuk mendukung kebutuhan daerah sekaligus memberlakukan desentralisasi.	(Purwanto Fiona, 2013: 38)	
3.	DAK (Dana Alokasi Khusus)	Menurut Abdul Halim (2007) APBN menyediakan dana ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), yang digunakan untuk membantu membayar kebutuhan tertentu.	Dana Alokasi Khusus dihitung dengan Kriteria umum. Kriteria umum dirumuskan melalui Kemampuan Keuangan Daerah.  Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan umum APBD – Belanja PNS Daerah.  Sumber : Laporan Realisasi APBD.	Rasio
4.	Kemiskinan	Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuanenuhi standar minimum kebutuhan dasar	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>dimana:  <math>\alpha = 0</math>  <math>z = \text{garis}</math></p>	Rasio

		yang meliputi kebutuhan makan ataupun non makan.	<p>kemiskinan</p> <p><math>y_i</math> = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<math>i = 1, 2, 3, \dots, q</math>),</p> <p><math>y_i &lt; z</math></p> <p><math>q</math> = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan</p> <p><math>n</math> = jumlah penduduk</p> <p>Sumber : BPS (2023)</p>	
--	--	--	--	--

### 3.5 Metode dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data time series atau data runtut waktu. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup rentang waktu dari tahun 2017 hingga 2021. Data time series merupakan sekumpulan observasi yang dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan model regresi berganda. Regresi berganda adalah metode statistika yang digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan antar variabel. Model ini melibatkan lebih dari satu

variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Analisis regresi linier berganda adalah teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas data. Selanjutnya, lakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah variabel X dalam penelitian ini memiliki dampak parsial atau simultan terhadap variabel Y. Paket statistik untuk ilmu sosial, atau SPSS, digunakan untuk memproses data di seluruh penelitian.

### **3.5.1 Uji Asumsi Klasik**

Tes asumsi klasik dijalankan untuk melihat apakah model regresi layak. Uji asumsi dilakukan dengan cara konvensional sebelum melakukan analisis regresi. Tes asumsi tradisional yang digunakan dalam penyelidikan ini terdiri dari:

#### **3.5.1.1 Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas, menurut Ghozali (2011), adalah untuk menentukan apakah variabel residual atau perancu dan model regresi memiliki distribusi normal. Gunakan Kolmogorov Smirnov's Test Normalcy dalam perangkat lunak SPSS untuk memverifikasi keadaan normal. Kesimpulan uji normalitas ini didasarkan pada gagasan bahwa data dianggap didistribusikan secara teratur jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05.

### 3.5.1.2 Uji Multikolinieritas

Tujuan uji multikolinieritas menurut Bhuono Agung (2005:58), adalah untuk mengetahui apakah satu variabel independen mirip dengan variabel lainnya. Hal ini tidak tunduk pada asumsi multikolinieritas jika  $R^2$  lebih besar dari nilai koefisien korelasi untuk setiap variabel independen. Ini menunjukkan bahwa jika tidak ada korelasi atau kemiripan di antara salah satu variabel independen, tes ini berhasil.

### 3.5.1.3 Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menentukan apakah kesalahan perancu pada periode  $t$  dan periode  $t-1$  (prior) berkorelasi dalam model regresi linier. Model regresi bebas korelasi-autokorelasi adalah jenis terbaik. Ketika ada  $n$  sampel dalam periode tertentu dari data deret waktu, autokorelasi sering hadir dalam sampel. Tes Durbin-Watson (tes DW) dapat digunakan untuk menentukan apakah autokorelasi ada atau tidak ada (Imam Ghozali, 2011).

Berikut adalah dasar untuk menentukan kehadiran autokorelasi:

1. Jika nilai koefisien autokorelasi (Durbin-Watson) adalah nol, maka tidak ada autokorelasi jika nilai DW berada dalam rentang  $(du)$  dan  $(4-du)$ .
2. Jika nilai koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, maka menunjukkan adanya autokorelasi positif jika nilai DW kurang dari batas bawah  $(dl)$ .

3. Jika terdapat autokorelasi negatif, maka nilai DW lebih dari  $(4-dl)$  dan koefisien autokorelasi kurang dari nol.
4. Jika hasilnya tidak jelas, artinya nilai DW berada di antara  $du$  dan  $dl$  atau antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ .

#### **3.5.1.4 Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Imam Ghozali (2011: 139), uji heteroskedastisitas dipicu ketika kesalahan atau residual yang diamati dalam model tidak menunjukkan varians yang konstan di antara pengamatan lainnya. Untuk memvisualisasikan uji heteroskedastisitas, scatterplot atau grafik plot merupakan alat yang berguna. Scatterplot memungkinkan titik-titik data tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu. Jika terdapat heteroskedastisitas, penyebaran titik-titik data akan terlihat di kedua arah, di atas dan di bawah sumbu Y nol.

#### **3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi linear berganda, dimana data pengamatan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu *variable* (Umar, 2011). Analisis ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh antara variabel dependen (Y) dan independen (X). Metode ini bisa juga digunakan sebagai ramalan sehingga dapat diperkirakan baik atau buruknya suatu variabel X terhadap naik turunnya variabel Y begitu juga

sebaliknya (Yulaifah, 2011). Untuk menghitung regresi linear berganda menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kemiskinan

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Umum (DAU)

X<sub>3</sub> = Dana Alokasi Khusus (DAK)

A = Konstanta

b<sub>1,2,3</sub> = Koefisien Regresi

e = Standar Error

Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS *Statistic version 22*.

### **3.6 Pengujian Hipotesis**

Terdapat dua jenis uji yang digunakan dalam pengujian hipotesis, yaitu uji hipotesis simultan (uji F) dan uji hipotesis parsial (uji t). Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua uji tersebut:

#### **3.6.1 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)**

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dalam persamaan memiliki dampak terhadap nilai variabel independen. Variabel dependen dapat secara signifikan mempengaruhi variabel independen jika

jumlah  $t$  lebih dari  $t$  dalam tabel, dalam hal ini  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  disetujui. Nilai  $t$  yang lebih kecil dalam tabel menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, menunjukkan bahwa variabel dependen tidak memiliki dampak yang terlihat pada variabel independen. Selanjutnya, jika nilai sig kurang dari 0,1, ini menunjukkan bahwa variabel dependen mempengaruhi variabel independen, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikan dengan tingkat kesalahan 5%. Variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen jika nilai sig lebih besar dari 0,1 (Umar, 2011). Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan di uji menggunakan uji  $t$  adalah  $H_1$  dan  $H_2$ .

### **3.6.2 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)**

Uji  $F$  digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor independen dan variabel dependen. Dalam analisis ini, kita membandingkan nilai  $F$  observasi dengan nilai  $F$  tabel untuk membuat keputusan. Jika nilai  $F$  observasi lebih besar dari nilai  $F$  tabel, maka hipotesis alternatif diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai  $F$  observasi lebih kecil dari nilai  $F$  tabel, maka hipotesis alternatif ditolak karena tidak ada pengaruh yang signifikan (Wahyuni, 2013). Dalam penelitian ini, uji  $F$  digunakan untuk menguji hipotesis  $H_4$ .

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

Kabupaten Aceh Timur merupakan sebuah Kabupaten yang berada di sisi timur Provinsi Aceh, Kabupaten ini juga termasuk kaya minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah sebesar 6.040,60 Km<sup>2</sup>, Secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 kecamatan, 54 mukim, 513 desa, 1 kelurahan dan 1.596 dusun.

Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, Sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0-308 m di atas permukaan laut. Komoditas unggulan Kabupaten Aceh Timur yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditas unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditas Kelapa Sawit, Kakao, Karet dan Kelapa. Sub sektor pertanian komoditas yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi kayu.

### **VISI**

"Membangun tatanan kehidupan masyarakat Aceh Timur yang islami, bermartabat, adil, dan demokratis berlandaskan UUPA sebagai wujud implementasi MoU Helsinki kesejahteraan seluruh rakyat Aceh Timur"

(Website Kab. Aceh Timur, 2020)

## **MISI**

1. Menjalankan Syariat Islam secara kaffah.
  2. Meningkatkan pendidikan dayah/pesantren secara terpadu.
  3. Menjaga keberlangsungan perdamaian.
  4. Mengupayakan kelanjutan proses reintegrasi, hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.
  5. Mewujudkan *Good Governance* dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
  6. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.
  7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.
  8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
  9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat
- (Website Kab. Aceh Timur, 2020).

## 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	5	-8056555482	3.60E+11	2.1271E+11	1.38273E+11
Dana Alokasi Umum	5	5.14E+12	6.08E+12	5.6794E+12	3.49325E+11
Dana Alokasi Khusus	5	9.62E+11	1.09E+12	1.0305E+12	5.31891E+10
Kemiskinan	5	61640.00	63690.00	62826.0000	880.75536
Valid N (listwise)	5				

Berdasarkan output diatas dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai terendah sebesar -8056555482 dan nilai tertinggi sebesar 359753868748.42 dengan nilai rata-ratanya sebesar 212714597287 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 138272575432.

Berdasarkan output diatas dapat diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Umum (X2) memiliki nilai terendah sebesar 5135111689000 dan nilai tertinggi sebesar 6077483871000 dengan nilai rata-ratanya sebesar 5679362582454 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 349325365400.

Berdasarkan output diatas dapat diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki nilai terendah sebesar 961903149480 dan nilai tertinggi sebesar 1089682121169 dengan nilai rata-ratanya sebesar 1030545340384 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 53189084467.

Berdasarkan output diatas dapat diketahui bahwa variabel Kemiskinan (Y) memiliki nilai terendah sebesar 61640 dan nilai

tertinggi sebesar 63690 dengan nilai rata-ratanya sebesar 62826 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 880.75536.

### 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas tujuannya menetapkan apakah kumpulan data normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilihat melalui dua metode, yang pertama melalui normal p-plot dan yang kedua melalui *kolmogorov smirnov*. Untuk melihat nilai normalitas melalui *kolmogorov smirnov* dengan ketentuan : Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka data penelitian terdistribusi normal. Kebalikannya, apabila nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 dengan demikian data penelitian tidak terdistribusi normal.

**Tabel 4.2**  
**Uji normalitas kolmogorov-smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	346.5844039
Most Extreme Differences	Absolute	.329
	Positive	.239
	Negative	-.329
Test Statistic		.329
Asymp. Sig. (2-tailed)		.080 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dari tabel *output SPSS* diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,080 > 0,05$ . Oleh karena itu dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa data didistribusikan secara normal berdasarkan alasan yang digunakan untuk membuat keputusan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* sebelumnya. Akibatnya, asumsi atau kriteria normalitas model regresi telah terpenuhi.

#### **4.3.2 Uji Multikolinearitas**

Untuk mengetahui apakah ada variabel independen dalam model yang mirip satu sama lain, diperlukan uji multikolinearitas. Korelasi yang kuat dihasilkan ketika variabel independen mirip satu sama lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas berpedoman pada Nilai *Tolerance*, yaitu : Apabila nilai *Tolerance*  $> 0,10$  artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Apabila nilai *Tolerance*  $< 0,10$  artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

**Tabel 4.3**  
**Uji multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	80749.915	18257.936		4.423	.142		
	Pendapatan Asli Daerah	2.757E-9	.000	.433	.647	.634	.346	2.888
	Dana Alokasi Umum	-1.835E-9	.000	-.728	-1.513	.372	.669	1.494
	Dana Alokasi Khusus	-7.847E-9	.000	-.474	-.634	.640	.277	3.611

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Dari tabel output diatas, pada bagian *Collinearity Statistics* diketahui nilai *Tolerance* untuk variabel PAD ( $X_1$ ) sebesar 0,346, DAU ( $X_2$ ) sebesar 0,669, dan DAK ( $X_3$ ) sebesar 0,277. Karena semua nilai *Tolerance* variabel independen  $> 0,10$ , Dengan demikian, dapat disimpulkan dari kerangka pengambilan keputusan tes multikolinearitas bahwa model regresi tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

Selanjutnya pedoman keputusan berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yaitu:

1. Apabila nilai VIF  $< 10,00$  maka tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.
2. Jika nilai VIF  $> 10,00$  maka terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

**Tabel 4.4**  
**Uji multikolinieritas VIF (*Variance Inflation Factor*)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	80749.915	18257.936		4.423	.142		
	Pendapatan Asli Daerah	2.757E-9	.000	.433	.647	.634	.346	2.888
	Dana Alokasi Umum	-1.835E-9	.000	-.728	-1.513	.372	.669	1.494
	Dana Alokasi Khusus	-7.847E-9	.000	-.474	-.634	.640	.277	3.611

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Berdasarkan tabel output diatas, pada bagian *Collinearity Statistics* diketahui nilai VIF untuk variabel PAD ( $X_1$ ) sebesar 2,888, DAU ( $X_2$ ) sebesar 1,494 dan DAK ( $X_3$ ) sebesar 3,611. Karena keempat variabel independen  $< 10,00$ , Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

### 4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi mencari hubungan antara kesalahan perancu pada periode  $t$  dan kesalahan perancu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) dalam model regresi linier. Kurangnya gejala autokorelasi adalah tanda data yang baik. Durbin Watson kerangka pengambilan keputusan uji autokorelasi.

1. Jika  $d$  (durbin watson)  $< dL$  atau  $> (4-dL)$  maka hipotesis nol ditolak, artinya ada autokorelasi.
2. Jika  $d$  (durbin watson) terletak antara  $dU$  dan  $(4-dU)$ , maka hipotesis nol diterima, artinya tidak ada autokorelasi.

3. Jika  $d$  (durbin watson) terletak antara  $dL$  dan  $dU$  atau diantara  $(4-dU)$  dan  $(4-dL)$ , artinya tidak berkesimpulan pasti.

Berikut hasil uji autokorelasi Durbin Watson pada tabel dibawah:

**Tabel 4.5**  
**Uji autokorelasi Durbin Watson**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.919 <sup>a</sup>	.845	.381	693.16881	2.159

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Tabel output "*Model Summary*" sebelumnya telah menunjukkan nilai Durbin-Watson ( $d$ ), yaitu 2,159. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus  $(k ; n)$ , nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson pada signifikansi 5%. adapun jumlah variabel independen adalah 3 atau " $k$ " = 3, sementara jumlah sampel atau " $n$ " = 93, maka  $(k ; n) = (3 ; 93)$ . Diketahui tidak terdapat nilai  $dL$  dan  $dU$  (lihat pada tabel durbin watson). Karena tidak adanya nilai  $dL$  dan  $dU$  tidak diketahui apakah terdapat gejala autokorelasi atau tidak. Oleh karena itu dilakukan uji *run test*.

**Tabel 4.6**  
**Tabel output uji Run Test**

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564								
8	0.7629	1.3324	0.4672	1.8964						
9	0.8243	1.3199	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
10	0.8791	1.3197	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
11	0.9273	1.3241	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
12	0.9708	1.3314	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
13	1.0097	1.3404	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
14	1.0450	1.3503	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
15	1.0770	1.3605	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
16	1.1062	1.3709	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
17	1.1330	1.3812	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
18	1.1576	1.3913	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
19	1.1804	1.4012	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
20	1.2015	1.4107	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
21	1.2212	1.4200	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
22	1.2395	1.4289	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
23	1.2567	1.4375	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
24	1.2728	1.4458	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
25	1.2879	1.4537	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
26	1.3022	1.4614	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
27	1.3157	1.4688	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
28	1.3284	1.4759	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
29	1.3405	1.4828	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
30	1.3520	1.4894	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
			1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326

Dasar pengambilan keputusan pada Uji *Run Test* dapat dilihat sebagai berikut, yaitu:

1. Apabila nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* < 0,05 artinya ada gejala autokorelasi
2. Sebaliknya, jika nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* > 0,05 artinya tidak ada gejala autokorelasi.

**Tabel 4.7**  
**Hasil uji Run Test**

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	149.17048
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	3
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Dari *output SPSS* tersebut, maka nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar  $1,000 > 0,05$ , kesimpulannya bahwa tidak ada gejala atau permasalahan autokorelasi.

#### 4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Ketika ada penyimpangan dari varians konstan dalam kesalahan atau residu model yang diamati, uji heteroskedastisitas dipicu. Tanda-tanda heteroskedastisitas seharusnya tidak muncul dalam model regresi yang sesuai. Uji Glejser berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam pengujian heteroskedastisitas: Apabila nilai signifikansi (Sig.)  $> 0,05$  dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Apabila signifikansi (Sig.)  $< 0,05$ , artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

**Tabel 4.8**  
**Uji heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6469,311	9391,068		.689	.616
	Pendapatan Asli Daerah	-1.163E-9	.000	-.739	-.531	.689
	Dana Alokasi Umum	-3.881E-10	.000	-.623	-.622	.646
	Dana Alokasi Khusus	-3.664E-9	.000	-.896	-.575	.668

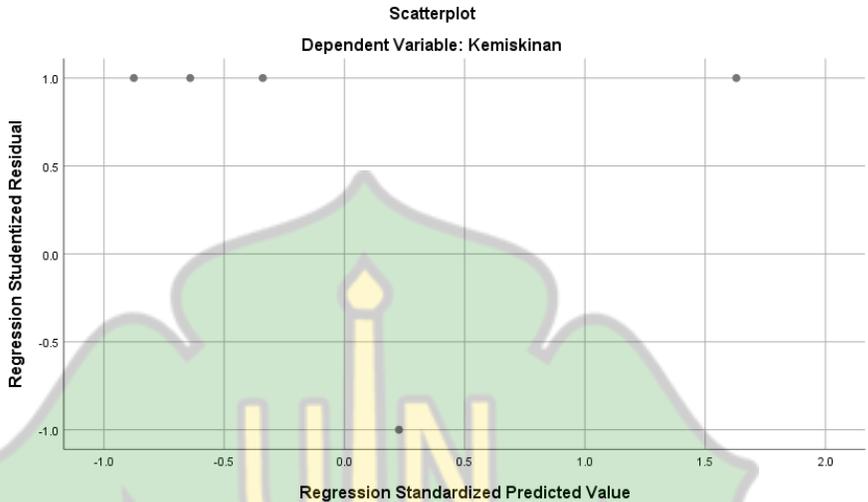
a. Dependent Variable: Abs\_Res

Dari output diatas, diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel PAD ( $X_1$ ) sebesar  $0,689 > 0,05$ , variabel DAU ( $X_2$ ) sebesar  $0,646 > 0,05$  dan variabel DAK ( $X_3$ ) sebesar  $0,668 > 0,05$ . Karena semua variabel independen terdapat nilai signifikansi  $> 0,05$ , Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membuat keputusan selama tes Glejser. Selain uji gletser, uji heteroskedastisitas menggunakan gambar *scatterplot* juga tersedia.

Dasar pengambilan keputusan Scatterplot yaitu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila:

1. Titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

**Gambar 4.1**  
**Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot***



Berdasarkan *output Scatter plots* diatas diketahui bahwa grafik ini sesuai dasar pengambilan keputusan *Scatterplot* diatas. Sehingga *output Scatter plots* diatas, terlihat bahwasanya model regresi tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal terpenuhi.

#### **4.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda ialah sebagai alat ukur mengetahui seberapa berpengaruh antara variabel dependen (Y) dan independen (X). Adapun hasil yang diperoleh seperti tabel dibawah:

**Tabel 4.9**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	80749.915	18257.936		4.423	.142
	Pendapatan Asli Daerah	2.757E-9	.000	.433	.647	.634
	Dana Alokasi Umum	-1.835E-9	.000	-.728	-1.513	.372
	Dana Alokasi Khusus	-7.847E-9	.000	-.474	-.634	.640

a. Dependent Variable: Kemiskinan

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = 80749,915 + 2,757 X_1 - 1,835 X_2 - 7,847 X_3 + e$$

Berdasarkan rumus diatas yang telah didapatkan hasilnya, maka dapat dianalisis sebagai berikut

- a. Nilai konstanta positif senilai 80749,915. Artinya semua variabel bebas terdiri dari  $X_1$  (PAD),  $X_2$  (DAU),  $X_3$  (DAK) bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Y (Kemiskinan) senilai 80749.
- b. Nilai koefisien regresi variabel  $X_1$  (PAD) adalah positif senilai 2,757. Artinya bila  $X_1$  (PAD) naik 1%, maka akan menaikkan nilai Y (Kemiskinan) senilai 2,757, asumsi variabel bebas lainnya dinilai konstan. Tanda positif berarti pengaruh searah antara variabel bebas dan variabel terikat.
- c. Nilai koefisien regresi variabel  $X_2$  (DAU) senilai -1,835. Artinya pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel DAU ( $X_2$ ) dan Kemiskinan (Y). Berarti jika variabel  $X_2$  (DAU) mengalami naik senilai 1%, jadi kebalikannya

variabel Y (Kemiskinan) akan menurun senilai -1,835 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

- d. Nilai koefisien regresi variabel  $X_3$  (DAK) senilai -7,847. Pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel DAK dan Kemiskinan. Artinya apabila variabel  $X_3$  (DAK) naik senilai 1%, maka kebalikannya variabel Y (Kemiskinan) akan turun senilai -7,847 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

## **4.5 Pengujian Hipotesis**

### **4.5.1 Hasil Uji t (Parsial)**

Uji t bertujuan mengetahui pada setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Pengujian dilaksanakan dengan melihat nilai taraf signifikan (*p value*), jika nilai taraf signifikan yang dihasilkan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Dasar pengambilan keputusan nilai signifikansi (Sig.) yaitu : Apabila nilai signifikansi (Sig.) < dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima. Jika nilai signifikansi (Sig.) > dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak. Hasil pengujian uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10**  
**Uji hipotesis t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	80749.915	18257.936		4.423	.142
	Pendapatan Asli Daerah	2.757E-9	.000	.433	.647	.634
	Dana Alokasi Umum	-1.835E-9	.000	-.728	-1.513	.372
	Dana Alokasi Khusus	-7.847E-9	.000	-.474	-.634	.640

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig.) variabel PAD ( $X_1$ ) adalah sebesar  $0,634 > 0,05$ . Sehingga kesimpulannya tidak terdapat pengaruh PAD ( $X_1$ ) terhadap Kemiskinan (Y). Kedua, untuk variabel DAU ( $X_2$ ) nilai signifikansi (Sig.) variabel DAU ( $X_2$ ) adalah sebesar  $0,372 > 0,05$ . Kesimpulannya tidak terdapat pengaruh DAU ( $X_2$ ) terhadap Kemiskinan (Y). Ketiga, untuk variabel DAK ( $X_3$ ) nilai signifikansi (Sig.) sebesar  $0,640 > 0,05$ . Kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh DAK ( $X_3$ ) terhadap Kemiskinan (Y).

Uji Hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel yaitu dengan pengambilan keputusan :

1. Apabila nilai t hitung  $>$  t tabel maka terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
2. Sebaliknya, apabila nilai t hitung  $<$  t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	80749.915	18257.936		4.423	.142
	Pendapatan Asli Daerah	2.757E-9	.000	.433	.647	.634
	Dana Alokasi Umum	-1.835E-9	.000	-.728	-1.513	.372
	Dana Alokasi Khusus	-7.847E-9	.000	-.474	-.634	.640

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Rumus untuk mencari nilai t tabel :

t tabel = (a/2 ; n-k-1 atau df residual)

t tabel = (0,05/2 ; 5-3-1)

t tabel = (0,025 ; 1)

t tabel = 12,71

**Gambar 4.2**  
**Distribusi t tabel**

Distribusi Nilai **t<sub>tabel</sub>**

df	t <sub>0,10</sub>	t <sub>0,05</sub>	t <sub>0,025</sub>	t <sub>0,01</sub>	t <sub>0,005</sub>	df	t <sub>0,10</sub>	t <sub>0,05</sub>	t <sub>0,025</sub>	t <sub>0,01</sub>	t <sub>0,005</sub>
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	61	1.296	1.671	2.000	2.390	2.659
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	62	1.296	1.671	1.999	2.389	2.659
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	63	1.296	1.670	1.999	2.389	2.658
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	64	1.296	1.670	1.999	2.388	2.657
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	65	1.296	1.670	1.998	2.388	2.657
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	66	1.295	1.670	1.998	2.387	2.656
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	67	1.295	1.670	1.998	2.387	2.655
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	68	1.295	1.670	1.997	2.386	2.655
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	69	1.295	1.669	1.997	2.386	2.654
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	70	1.295	1.669	1.997	2.385	2.653
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	71	1.295	1.669	1.996	2.385	2.653
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	72	1.295	1.669	1.996	2.384	2.652
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	73	1.295	1.669	1.996	2.384	2.651
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	74	1.295	1.668	1.995	2.383	2.651
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	75	1.295	1.668	1.995	2.383	2.650
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	76	1.294	1.668	1.995	2.382	2.649
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	77	1.294	1.668	1.994	2.382	2.649
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	78	1.294	1.668	1.994	2.381	2.648
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	79	1.294	1.668	1.994	2.381	2.647
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	80	1.294	1.667	1.993	2.380	2.647
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	81	1.294	1.667	1.993	2.380	2.646
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	82	1.294	1.667	1.993	2.379	2.645
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	83	1.294	1.667	1.992	2.379	2.645
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	84	1.294	1.667	1.992	2.378	2.644
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	85	1.294	1.666	1.992	2.378	2.643

Berdasarkan tabel Hasil Uji t di atas didapatkan hasil pengambilan keputusannya yaitu:

- a. Nilai  $t_{hitung}$  yang didapatkan untuk variabel  $X_1$  adalah 0,647 < 12,71. Maka didapatkan hasil bahwa variabel  $X_1$  (PAD) **tidak berpengaruh** terhadap variabel Y (Kemiskinan).
- b. Nilai  $t_{hitung}$  yang didapatkan untuk variabel  $X_2$  adalah -1,513 > 12,71. Maka didapatkan hasil bahwa variabel  $X_2$  (DAU) **tidak berpengaruh** terhadap variabel Y (Kemiskinan).
- c. Nilai  $t_{hitung}$  yang didapatkan untuk variabel  $X_3$  adalah -0,634 < 12,71. Maka didapatkan hasil bahwa variabel  $X_3$  (DAK) **tidak berpengaruh** terhadap variabel Y (Kemiskinan).

#### 4.5.2 Hasil Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua *variable* terikatnya, atau untuk menguji apakah regresi baik/signifikan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F yaitu menurut Nilai Signifikansi (Sig.) dari Output Anova yaitu : Apabila nilai sig. < 0,05 artinya hipotesis diterima. Dengan demikian PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ) dan DAK ( $X_3$ ) secara simultan mempengaruhi Kemiskinan (Y). Jika nilai sig. > 0,05 maka hipotesis ditolak. Artinya PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ) dan DAK ( $X_3$ ) secara simultan tidak mempengaruhi Kemiskinan (Y). Hasil pengujian uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**Uji hipotesis F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2622437.004	3	874145.668	1.819	.488 <sup>b</sup>
	Residual	480482.996	1	480482.996		
	Total	3102920.000	4			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel output diatas, bahwa nilai Sig. yaitu 0,488. Karena sig.  $0,488 > 0,05$ , sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji F bahwa hipotesis ditolak atau PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ) dan DAK ( $X_3$ ) secara simultan tidak mempengaruhi Kemiskinan (Y).

Uji Hipotesis F dengan membandingkan F hitung dengan F tabel yaitu dengan pengambilan keputusan :

1. Apabila nilai F hitung  $>$  F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ) dan DAK ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y).
2. Apabila nilai F hitung  $<$  F tabel, maka hipotesis ditolak. Artinya PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ) dan DAK ( $X_3$ ) secara simultan tidak mempengaruhi Kemiskinan (Y).

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2622437.004	3	874145.668	1.819	.488 <sup>b</sup>
	Residual	480482.996	1	480482.996		
	Total	3102920.000	4			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Rumus mencari F tabel :

$$F \text{ tabel} = (k ; n-k)$$

$$F \text{ tabel} = (3 ; 5 - 3)$$

$$F \text{ tabel} = (3 : 2)$$

$$F \text{ tabel} = 19,164$$

**Gambar 4.3**  
**Distribusi f tabel**

	A	B	C	D	E	F
1	Probabilitas	0.05				<a href="http://www.statstool.org/">www.sta</a>
2						
3						
4			DF2			
	DF1	1	2	3	4	5
5	1	161.448	18.513	10.128	7.709	6.608
6	2	199.500	19.000	9.552	6.944	5.786
7	3	215.707	19.164	9.277	6.591	5.409
8	4	224.583	19.247	9.117	6.388	5.192
9	5	230.162	19.296	9.013	6.256	5.050
10	6	233.986	19.330	8.941	6.163	4.950
11	7	236.768	19.353	8.887	6.094	4.876
12	8	238.883	19.371	8.845	6.041	4.818
13	9	240.543	19.385	8.812	5.999	4.772
14	10	241.882	19.396	8.786	5.964	4.735
15	11	242.983	19.405	8.763	5.936	4.704
16	12	243.906	19.413	8.745	5.912	4.678
17	13	244.690	19.419	8.729	5.891	4.655
18	14	245.364	19.424	8.715	5.873	4.636
19	15	245.950	19.429	8.703	5.858	4.619
20	16	246.464	19.433	8.692	5.844	4.604
21	17	246.918	19.437	8.683	5.832	4.590
22	18	247.323	19.440	8.675	5.821	4.579
23	19	247.686	19.443	8.667	5.811	4.568
24	20	248.013	19.446	8.660	5.803	4.558
25	21	248.309	19.448	8.654	5.795	4.549
26	22	248.579	19.450	8.648	5.787	4.541

Menurut tabel output Anova, diketahui F hitung yaitu 1,819. Karena F hitung  $1,819 < F \text{ tabel } 19,164$ , sesuai dasar

pengambilan keputusan uji F bahwa hipotesis ditolak atau PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ) dan DAK ( $X_3$ ) secara simultan tidak mempengaruhi Kemiskinan ( $Y$ ).

## **4.6 Pembahasan**

### **4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil uji t yaitu menguji pengaruh secara parsial antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur didapatkan Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel  $X_1$  adalah  $0,647 < 12,71$ . Maka didapatkan hasil bahwa variabel  $X_1$  (PAD) tidak berpengaruh terhadap variabel  $Y$  (Kemiskinan). Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung adanya pengaruh signifikan PAD terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ini mendukung temuan dari Fikri et al. (2019) yang tidak menemukan adanya korelasi antara kemiskinan dan pendapatan asli lokal. Selain itu, penelitian oleh Wididarma dan Jember (2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan lainnya yang dikemukakan oleh Fitriyanti dan Handayani (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan menghambat upaya penurunan kemiskinan. Selanjutnya,

penelitian oleh Paat et al. (2019) menemukan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **4.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil uji t yaitu menguji pengaruh secara parsial antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur didapatkan Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel  $X_2$  adalah  $-1,513 > 12,71$ . Maka didapatkan hasil bahwa variabel  $X_2$  (DAU) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Kemiskinan).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri et al., (2019) mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Berbeda dengan hasil penelitian Kadafi & Murtala (2020) mengungkapkan bahwa DAU telah memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh. Selanjutnya Rasu, Kumenaung, & Koleangan (2021) mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Riza Amami dan Kiki Asmara (2022) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya variasi dalam konteks pengaruh DAU terhadap kemiskinan di Kabupaten

Aceh Timur. Faktor-faktor seperti metodologi penelitian, sampel yang digunakan, variabel lain yang diteliti, dan karakteristik daerah penelitian dapat mempengaruhi hasil yang berbeda ini. Oleh karena itu, penting untuk melihat secara holistik hasil penelitian tersebut dan mempertimbangkan konteks yang lebih luas dalam menginterpretasikan pengaruh DAU terhadap kemiskinan.

#### **4.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil uji t yaitu menguji pengaruh secara parsial antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur didapatkan Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel  $X_3$  adalah  $-0,634 < 12,71$ . Maka didapatkan hasil bahwa variabel  $X_3$  (DAK) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Kemiskinan).

Penelitian ini mendukung temuan dari Fikri et al. (2019) yang tidak menemukan adanya dampak parsial yang signifikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan. Namun, berdasarkan penelitian Fitriyanti dan Handayani (2020), terdapat dampak buruk yang signifikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap upaya pengurangan kemiskinan.

Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya variasi dalam konteks pengaruh DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. Faktor-faktor seperti metodologi penelitian, sampel yang digunakan, variabel lain yang diteliti, dan karakteristik daerah

penelitian dapat mempengaruhi hasil yang berbeda ini. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan melihat secara holistik hasil penelitian tersebut dalam menginterpretasikan pengaruh DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.

#### **4.6.4 Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil uji F yaitu pada output Anova, diketahui nilai F hitung adalah sebesar 1,819. Karena nilai F hitung  $1,819 < F$  tabel 19,164, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak atau dengan kata lain PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ) dan DAK ( $X_3$ ) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan ( $Y$ ). Tidak berpengaruhnya ketiga variabel ini secara simultan, menurut asumsi penulis diperkirakan karena masalah penggunaan dana yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya yang tersedia, dominasi faktor eksternal lainnya, dan variabilitas regional yang mempengaruhi kemiskinan di wilayah tersebut.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil studi Fikri et al. (2019) yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, maupun dana alokasi khusus secara bersamaan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paulus et al. (2019)

yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara kolektif memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan.

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan temuan ini. Pertama, masalah penggunaan dana dapat menjadi penyebabnya, meskipun dana tersebut dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan, mungkin terjadi ketidakefektifan atau ketidaktepatan dalam penggunaannya. Misalnya, dana tersebut mungkin digunakan untuk program-program yang tidak langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan atau tidak mencapai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Hal ini dapat mengurangi dampak yang diharapkan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kedua, keterbatasan sumber daya juga dapat memainkan peran penting. Jumlah dana yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk secara signifikan mengatasi masalah kemiskinan yang meluas dan kompleks di Kabupaten Aceh Timur. Pengaruh pendapatan daerah terhadap kemiskinan mungkin terbatas karena keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk diinvestasikan dalam program-program anti-kemiskinan.

Selain itu, faktor eksternal yang tidak terkendali langsung oleh pemerintah daerah, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan pemerintah pusat, atau fluktuasi harga komoditas, juga dapat memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Jika faktor-faktor ini lebih dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur,

maka pengaruh langsung dari PAD, DAU, dan DAK mungkin menjadi kurang terlihat dalam penelitian tersebut. Terakhir, variabilitas regional juga perlu diperhatikan. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan unik yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kabupaten Aceh Timur mungkin memiliki faktor-faktor atau dinamika lokal yang tidak tercakup dalam penelitian tersebut, seperti geografi, aksesibilitas, struktur ekonomi lokal, atau kebijakan lokal. Variabilitas ini dapat menjelaskan mengapa PAD, DAU, dan DAK tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Dalam kesimpulannya, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur tidak terlihat secara signifikan, dan faktor-faktor seperti masalah penggunaan dana, keterbatasan sumber daya, faktor eksternal dominan, dan variabilitas regional dapat menjadi penjelasan yang relevan.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas dan mungkin memerlukan penelitian lanjutan untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.

## **BAB V PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dapat disimpulkan dari temuan penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.
2. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.
3. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat diberikan beberapa saran dari penelitian ini yaitu:

1. Saran untuk Pemerintah:
  - Evaluasi Kebijakan: Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah dilakukan terkait dengan pendapatan daerah dan alokasi dana. Perlu diperiksa

apakah kebijakan tersebut telah efektif dalam mengurangi kemiskinan atau tidak.

- **Diversifikasi Sumber Pendapatan:** Pemerintah perlu mencari sumber pendapatan alternatif selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan daerah. Misalnya, melalui pengembangan sektor ekonomi lokal atau menarik investasi asing.
  - **Perkuat Pengawasan:** Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efektif dan efisien untuk mengurangi kemiskinan.
2. **Saran untuk Masyarakat:**
- **Peningkatan Keterampilan:** Masyarakat perlu meningkatkan keterampilan dan memperoleh pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan mereka.
  - **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Masyarakat dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah serta membeli produk lokal untuk mendukung perekonomian daerah.

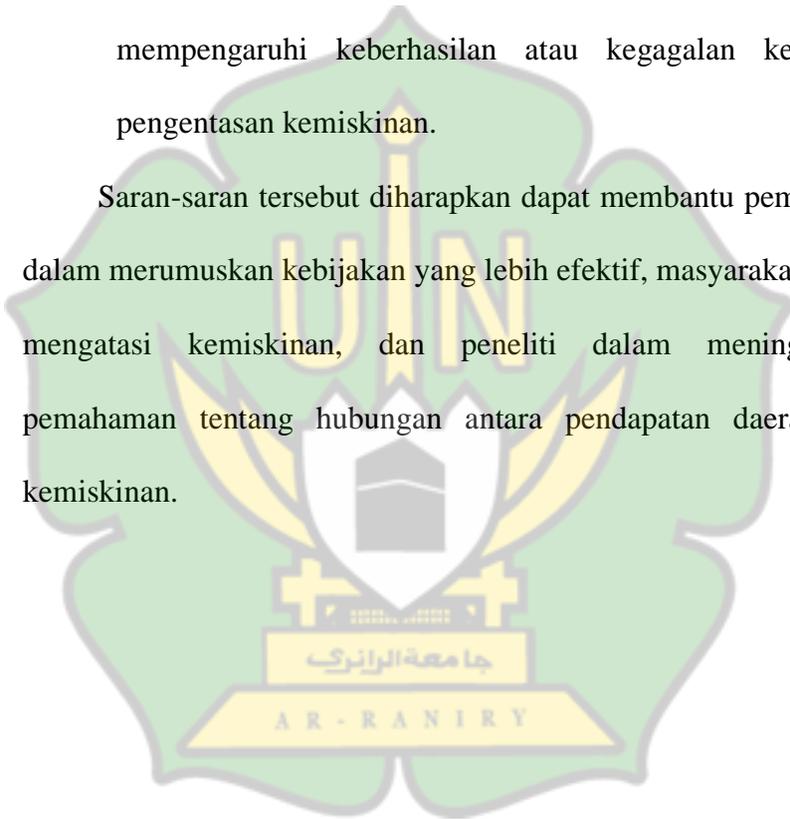
- Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat perlu aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah terkait dengan alokasi dana dan kebijakan pembangunan untuk memastikan kepentingan mereka terwakili.

### 3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya:

- Studi Komprehensif: Peneliti dapat melakukan studi yang lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan metodologi yang lebih canggih untuk menilai hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kemiskinan. Hal ini dapat melibatkan analisis data jangka panjang, penggunaan model ekonometrik yang lebih rumit, atau pendekatan eksperimen.
- Faktor-faktor Lain: Peneliti dapat memperluas analisis untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, seperti tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, akses ke layanan kesehatan, dan infrastruktur.

- Studi Perbandingan: Peneliti dapat melakukan studi perbandingan antara daerah yang berhasil mengurangi kemiskinan dengan daerah yang tidak berhasil. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, masyarakat dalam mengatasi kemiskinan, dan peneliti dalam meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara pendapatan daerah dan kemiskinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. & Halim, A. (2004). Desentralisasi Fiskal dan Pola Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 40(3), 329-346.
- Adisasmita, Rahardjo. (2016). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmad Yani, 2019. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2018). Analisis sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95-104
- Amami, R. & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 48-54.
- Anwar, M. Palar, S., & Samual, S. (2016). Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(3), 1487-1500.
- Aprillyana, N. (2020). Estimasi Indikator Kemiskinan Tingkat Kecamatan Menggunakan Regresi Keekar M-Kuantil. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 3(2), 17-17.
- BPS. (2023). <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Djarwanto. (1994). *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Yogyakarta : Liberty.

- Elly, Setiadi, M. & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenamedia.
- Ernita, D. Putri, O. H. & Sari, I. P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Jambi, *Jurnal AKRAB JUARA*, 5, 200-216.
- Febrianto, D. (2022). Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening di Provinsi Jawa Barat. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2411-2425.
- Fikri, K. Sudrajat, U., & Remofa, Y. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 257-269.
- Fitriyanti, N. I. & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79-90.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8.No Title* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hsiao, C. (2003). *Analysis of Panel Data* (2 ed.). New York: Cambridge University Press.
- Huda, Nurul ddk. (2015). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Isramirwati, A., & Rasuli, R. (2017). Pendapatan Asli Daerah dan Penurunan Kemiskinan: Bukti dari Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Pengembangan*, 8(2), 49-54.
- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015. *Pekbis Jurnal*, 9 (3), 195-199
- Jolianis. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economic and Economic Education*, 4(2), 34-57
- Kadafi, M., & Murtala, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23-31.
- Kawedar, Warsito, Rohman, A., & Handayani, S. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Kuncoro, Mudrajat. 2014. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga.
- Manek, Marianus.,Badrudin,Rudy.(2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Telaah Bisnis*,17(2),81-98. Diakses dari <http://journal.stimykp.ac.id/index.php/tb>
- Mutaqodim, B. R. (2015). *Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Terhadap Kinerja Keuangan Pegawai Lembaga*

*Keuangan Syariah di Kabupaten Pendeglang. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

- Oktaviani, Nur Atika. (2018). Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 305-313
- Paat, D. C., Koleangan, R. A., & Rimate, V. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(4)
- Paulus, C. S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 4(2), 25-35.
- Paulus, D. I. S., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2019). Analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiskinan melalui belanja daerah di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(5).
- Priyatno, D. (2011). *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat Lebih Akurat*. Yogyakarta : Medikom.
- Purwanto, Fiona. P. D. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011). Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
- Rachmawati, M. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat). *Prodi Akuntansi UPY*.

- Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2).
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 46-58.
- Sidik, M., & dan Masyarakat, L. P. E. (2016). Dana alokasi umum: konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah. Jakarta: Buku Kompas
- Siregar, R. (2007). Dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap Penurunan Kemiskinan: Studi Kasus Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 57(2), 145-162.
- Subandi, (2016). *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Keempat. Bandung: Alfabeta. Title Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. (2004). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Syahidin, S. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(1), 1-15
- Umar, H. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Wahyuni, A. (2013). *Pengaruh budaya psikologis dan Pribadi Terhadap keputusan Nasabah Dalam Memilih Pembiayaan*

*Murabahah Pada BMT Bina Ummat Mandiri Tambang.*  
Skripsi UIN Sultan Kasim Riau.

- Website Kab. Aceh Timur. (2020). Visi dan Misi. <https://acehtimurkab.go.id/halaman/visi-dan-misi>. (diakses pada tanggal 28 Oktober 2023).
- Wididarma, K., & Jember, M. (2021). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(7), 2982-3010.
- Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (2018). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(1), 156-166
- Wing Wahyu Winarno. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Edisi Ketiga. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP STIM YKPN).
- Wooldridge, Jeffrey M., (2009), *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, Fourth Ed., South Western Cengage Learning, Canada.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Analisis Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	5	-8056555482	3.60E+11	2.1271E+11	1.38273E+11
Dana Alokasi Umum	5	5.14E+12	6.08E+12	5.6794E+12	3.49325E+11
Dana Alokasi Khusus	5	9.62E+11	1.09E+12	1.0305E+12	5.31891E+10
Kemiskinan	5	61640.00	63690.00	62826.0000	880.75536
Valid N (listwise)	5				



## Lampiran 2. Data Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	346.5844039
Most Extreme Differences	Absolute	.329
	Positive	.239
	Negative	-.329
Test Statistic		.329
Asymp. Sig. (2-tailed)		.080 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### Keputusan dalam Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov :

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

### Lampiran 3. Data Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	80749.915	18257.936		4.423	.142		
	Pendapatan Asli Daerah	2.757E-9	.000	.433	.647	.634	.346	2.888
	Dana Alokasi Umum	-1.835E-9	.000	-.728	-1.513	.372	.669	1.494
	Dana Alokasi Khusus	-7.847E-9	.000	-.474	-.634	.640	.277	3.611

a. Dependent Variable: Kemiskinan

### Pedoman Keputusan Berdasarkan Nilai Tolerance

1. Jika nilai Tolerance  $> 0,10$  maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi
2. Jika nilai Tolerance  $< 0,10$  maka artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	80749.915	18257.936		4.423	.142		
	Pendapatan Asli Daerah	2.757E-9	.000	.433	.647	.634	.346	2.888
	Dana Alokasi Umum	-1.835E-9	.000	-.728	-1.513	.372	.669	1.494
	Dana Alokasi Khusus	-7.847E-9	.000	-.474	-.634	.640	.277	3.611

a. Dependent Variable: Kemiskinan

### Pedoman Keputusan Berdasarkan Nilai VIF (Variance Inflation Factor)

1. Jika nilai VIF  $< 10,00$  maka artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.
2. Jika nilai VIF  $> 10,00$  maka artinya terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

## Lampiran 4. Data Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.919 <sup>a</sup>	.845	.381	693.16881	2.159

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Kemiskinan

### Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Autokorelasi Durbin Watson

1. Jika  $d$  (durbin watson) lebih kecil dari  $dL$  atau lebih besar dari  $(4-dL)$  maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika  $d$  (durbin watson) terletak antara  $dU$  dan  $(4-dU)$ , maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika  $d$  (durbin watson) terletak antara  $dL$  dan  $dU$  atau diantara  $(4-dU)$  dan  $(4-dL)$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326

**Runs Test**

Unstandardized Residual

Test Value <sup>a</sup>	149.17048
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	3
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

**Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Run Test :**

1. Jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi
2. Sebaliknya, jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

## Lampiran 5. Data Uji Heteroskedastisitas

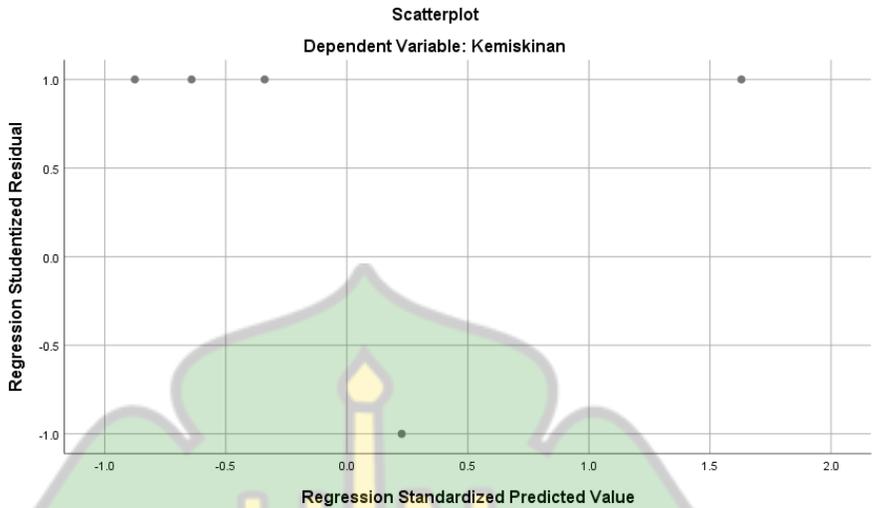
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6469.311	9391.068		.689	.616
	Pendapatan Asli Daerah	-1.163E-9	.000	-.739	-.531	.689
	Dana Alokasi Umum	-3.881E-10	.000	-.623	-.622	.646
	Dana Alokasi Khusus	-3.664E-9	.000	-.896	-.575	.668

a. Dependent Variable: Abs\_Res

### Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser :

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
2. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.



**Dasar pengambilan keputusan Scatterplot :**

**Tidak terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas jika:**

1. Titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

## Lampiran 6. Data Analisis Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

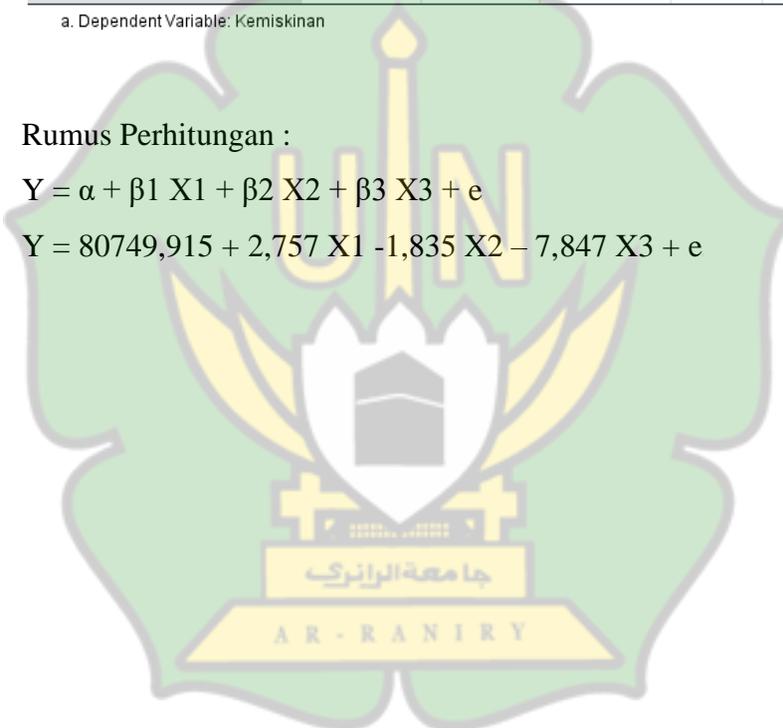
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	80749.915	18257.936		4.423	.142
	Pendapatan Asli Daerah	2.757E-9	.000	.433	.647	.634
	Dana Alokasi Umum	-1.835E-9	.000	-.728	-1.513	.372
	Dana Alokasi Khusus	-7.847E-9	.000	-.474	-.634	.640

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Rumus Perhitungan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 80749,915 + 2,757 X_1 - 1,835 X_2 - 7,847 X_3 + e$$



## Lampiran 7. Data Uji Hipotesis T (Parsial)

### Uji Hipotesis Membandingkan Nilai Sig. Dengan 0,05

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	80749.915	18257.936		4.423	.142
	Pendapatan Asli Daerah	2.757E-9	.000	.433	.647	.634
	Dana Alokasi Umum	-1.835E-9	.000	-.728	-1.513	.372
	Dana Alokasi Khusus	-7.847E-9	.000	-.474	-.634	.640

a. Dependent Variable: Kemiskinan

### Dasar pengambilan keputusan nilai signifikansi (Sig.)

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) < dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
2. Jika nilai signifikansi (Sig.) > dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak

## Uji Hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	80749.915	18257.936		4.423	.142
	Pendapatan Asli Daerah	2.757E-9	.000	.433	.647	.634
	Dana Alokasi Umum	-1.835E-9	.000	-.728	-1.513	.372
	Dana Alokasi Khusus	-7.847E-9	.000	-.474	-.634	.640

a. Dependent Variable: Kemiskinan

### Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika nilai t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
2. Sebaliknya, jika nilai t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Rumus untuk mencari nilai t tabel :

t tabel = (a/2 ; n-k-1 atau df residual)

t tabel = (0,05/2 ; 5-3-1)

t tabel = (0,025 ; 1)

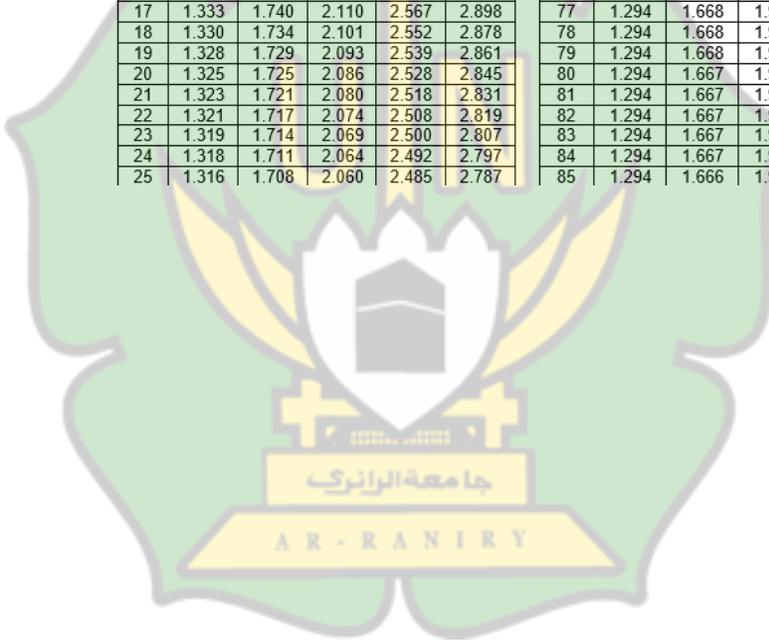
t tabel = 12,71

## Distribusi Nilai $t_{tabel}$



df	$t_{0,10}$	$t_{0,05}$	$t_{0,025}$	$t_{0,01}$	$t_{0,005}$
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787

df	$t_{0,10}$	$t_{0,05}$	$t_{0,025}$	$t_{0,01}$	$t_{0,005}$
61	1.296	1.671	2.000	2.390	2.659
62	1.296	1.671	1.999	2.389	2.659
63	1.296	1.670	1.999	2.389	2.658
64	1.296	1.670	1.999	2.388	2.657
65	1.296	1.670	1.998	2.388	2.657
66	1.295	1.670	1.998	2.387	2.656
67	1.295	1.670	1.998	2.387	2.655
68	1.295	1.670	1.997	2.386	2.655
69	1.295	1.669	1.997	2.386	2.654
70	1.295	1.669	1.997	2.385	2.653
71	1.295	1.669	1.996	2.385	2.653
72	1.295	1.669	1.996	2.384	2.652
73	1.295	1.669	1.996	2.384	2.651
74	1.295	1.668	1.995	2.383	2.651
75	1.295	1.668	1.995	2.383	2.650
76	1.294	1.668	1.995	2.382	2.649
77	1.294	1.668	1.994	2.382	2.649
78	1.294	1.668	1.994	2.381	2.648
79	1.294	1.668	1.994	2.381	2.647
80	1.294	1.667	1.993	2.380	2.647
81	1.294	1.667	1.993	2.380	2.646
82	1.294	1.667	1.993	2.379	2.645
83	1.294	1.667	1.992	2.379	2.645
84	1.294	1.667	1.992	2.378	2.644
85	1.294	1.666	1.992	2.378	2.643



## Lampiran 8. Data Uji Hipotesis F (Simultan)

Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig.) dari Output Anova

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2622437.004	3	874145.668	1.819	.488 <sup>b</sup>
	Residual	480482.996	1	480482.996		
	Total	3102920.000	4			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

### Dasar pengambilan keputusan dalam Uji F

1. Jika nilai sig.  $< 0,05$  maka hipotesis diterima. Maka artinya PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y).
2. Jika nilai sig.  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak. Maka artinya PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y).

Berdasarkan Perbandingan Nilai F hitung dengan F tabel

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2622437.004	3	874145.668	1.819	.488 <sup>b</sup>
	Residual	480482.996	1	480482.996		
	Total	3102920.000	4			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

### Dasar pengambilan keputusan dalam Uji F

1. Jika nilai F hitung  $>$  F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y).
2. Jika nilai F hitung  $<$  F tabel, maka hipotesis ditolak. Maka artinya PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y).

Rumus mencari F tabel :

$$F \text{ tabel} = (k ; n-k)$$

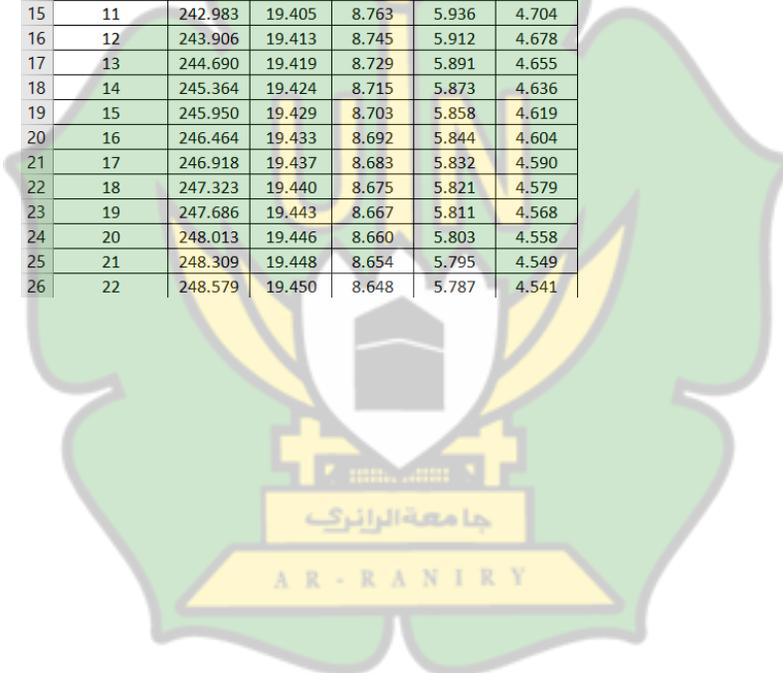
$$F \text{ tabel} = (3 ; 5 - 3)$$

$$F \text{ tabel} = (3 : 2)$$

$$F \text{ tabel} = 19,164$$



	A	B	C	D	E	F
1	Probabilitas	0.05		<a href="http://www.statistic.com">www.stat</a>		
2						
3		DF2				
4	DF1	1	2	3	4	5
5	1	161.448	18.513	10.128	7.709	6.608
6	2	199.500	19.000	9.552	6.944	5.786
7	3	215.707	19.164	9.277	6.591	5.409
8	4	224.583	19.247	9.117	6.388	5.192
9	5	230.162	19.296	9.013	6.256	5.050
10	6	233.986	19.330	8.941	6.163	4.950
11	7	236.768	19.353	8.887	6.094	4.876
12	8	238.883	19.371	8.845	6.041	4.818
13	9	240.543	19.385	8.812	5.999	4.772
14	10	241.882	19.396	8.786	5.964	4.735
15	11	242.983	19.405	8.763	5.936	4.704
16	12	243.906	19.413	8.745	5.912	4.678
17	13	244.690	19.419	8.729	5.891	4.655
18	14	245.364	19.424	8.715	5.873	4.636
19	15	245.950	19.429	8.703	5.858	4.619
20	16	246.464	19.433	8.692	5.844	4.604
21	17	246.918	19.437	8.683	5.832	4.590
22	18	247.323	19.440	8.675	5.821	4.579
23	19	247.686	19.443	8.667	5.811	4.568
24	20	248.013	19.446	8.660	5.803	4.558
25	21	248.309	19.448	8.654	5.795	4.549
26	22	248.579	19.450	8.648	5.787	4.541



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Diri

Nama : Ausath  
NIM : 170604125  
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh 09 November 1999  
Alamat : Dusun Ujong Blang, Desa Blang Pauh Sa,  
Kecamatan Julok  
No. HP : 081328190489  
Email Student : 170604125@student.ar-raniry.ac.id  
Email Pribadi : ausath01@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1 Kuta Binjai
2. SMP : MTSN 1 Kuta Binjai
3. SMA : SMAN 1 Idi Rayeuk
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Rustam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Siti Hajar  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Dusun Ujong Blang, Desa Blang Pauh Sa,  
Kecamatan Julok